

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan perhitungan terhadap 63 teks berita mengenai kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia selama periode Februari-September 2012, untuk melihat apakah dalam pemberitaan lingkungan hidup Kompas telah menerapkan objektivitas dengan baik atau sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa Kompas telah menerapkan objektivitas dengan baik berdasarkan kategorisasi objektivitas Rahma Ida. Di mana dalam penelitian ini digunakan untuk menilai baik atau tidaknya objektivitas Kompas dalam pemberitaan lingkungan.

Dari dimensi akurasi dapat dilihat dari empat kategori yaitu kesesuaian judul dengan isi berita, pencantuman waktu, penggunaan data pendukung, dan faktualitas berita. Objektivitas dinilai baik dalam kategori ini karena berdasarkan hasil penelitian Kompas menunjukkan dalam sebagian besar teks berita yang menjadi sampel penelitian bahwa judul yang ditentukan memiliki kesesuaian dengan isi berita, waktu kejadian atau wawancara disertakan dalam berita, menggunakan data pendukung untuk memperjelas berita dan tidak terdapat pencampuran fakta dan opini dalam berita.

Dimensi ketidakberpihakan menunjukkan objektivitas yang baik dengan menghadirkan lebih dari satu sumber berita dan menampilkan ukuran fisik luas

kolom yang sama di antara narasumber dalam berita. Dimensi validitas menunjukkan objektivitas yang dinilai baik dengan atribusi yang jelas dari sumber berita dan kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita dapat dipercaya yaitu bersumber dari pelaku langsung. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas telah memenuhi nilai-nilai objektivitas secara baik dan berimbang.

2. Kritik dan Saran

2.1. Kritik

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyadari terdapat kekurangan dan kelemahan, diantaranya:

- a. Peneliti menemukan bahwa terdapat unit analisis yang ditentukan oleh peneliti kurang fokus sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengkoding saat mengisi lembar koding. Namun hal itu dapat teratasi ketika peneliti mencoba menjelaskan definisi operasionalnya sehingga hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan harapan peneliti.
- b. Peneliti juga menemukan bahwa terdapat kelemahan pada metode Rahma Ida khususnya pada bagian kompetensi berdasarkan sumber berita. Pada metode ini kompetensi hanya dilihat dari 3 hal dan tidak dijelaskan atau tidak ada ukuran secara pasti perbedaan antara narasumber yang kompeten atau tidak.
- c. Peneliti menyadari telah banyak penelitian mengenai objektivitas yang dilakukan.

2.2. Saran

- a. Peneliti berharap bagi penelitian selanjutnya yang menyangkut pemberitaan seputar objektivitas berita lingkungan menggunakan media selain Kompas. Seperti, media lokal atau media yang belum secara tetap memberitakan berita seputar lingkungan sebagai objek penelitian. Mengingat hasil dari penelitian ini menunjukkan objektivitas Kompas sudah tinggi dalam pemberitaan lingkungan hidup.
- b. Dalam penelitian mengenai lingkungan, peneliti seharusnya mengetahui istilah-istilah ilmiah mengenai lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abrar, Ana Nadya. 1993. *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Daniel, Valerina. 2009. *Easy Green Living*. Bandung: Hikmah
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktisi Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga
- Noviriyanti, Andi. 2006. *Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan*. Riau: Takar
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rivers William L dan Mathews. 1994. *Etika Media Massa dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya*. Bandung: Rosdakarya
- Rahayu. (ed). 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers dan Departemen Komunikasi dan Informasi.
- Rosentiel Tom & Kovach Bill. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau
- Sularto, St. (ed). 2007. *Kompas Menulis dari Dalam*. Jakarta: Kompas Gramedia

JURNAL :

Harsono, Soni Sisbudi. 2012. *Mitigasi dan Adaptasi Kondisi Lahan Gambut di Indonesia dengan Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Insist Press.

Jhamtani Hira. 2012. *Perubahan Iklim dan Industrialisasi Ilmu*. Yogyakarta: Insist Press.

Kusumayudha dan Isbandiyah, Hs. 2006. *Lingkungan Hidup dan Media Massa*. UGM, 1-14.

Suryatmojo Hatma. 2012. *Adaptasi Masyarakat di kawasan Ekosistem Gambut dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim*. Yogyakarta: Insist Press.

SKRIPSI DAN TESIS:

Heneok, Yunie. 2007. *Analisis Isi Media Kompas Terkait Berita Pemanasan Global*. Petra University. Skripsi

Haswari, Aninda. 2010. *Jurnalisme Lingkungan Seputar Berita Pergerakan Tanah Jawa*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

Trikurniati, Elizabeth Paulina Dewi. 2010. *Jurnalisme Lingkungan Media Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

Nurraya, Nillam. 2011. *Objektivitas Berita Kerusakan Temanggung*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

Rademakers, Lisa. 2004. *Examining the handbooks on Enviromental Journalism*. South Florida University. Thesis

SURAT KABAR :

Lingkungan dan Peran Media oleh Birgitta Bestari Puspita. Bernas Jogja 26 Juni 2012. Hal.4

Surat Kabar Harian Kompas. 5 Maret 2013. Hal.6

DATA ONLINE:

Departemen Kehutanan. 2012. Minggu Ke II Bulan September 2012. Frekuensi pemberitaan Media Massa Seputar Lingkungan. Website (Akses 18 Maret 2013) dan tersedia di World Wide Web: <http://www.dephut.go.id>

Zubaedah Neneng. 2012. 12 Januari 2012. MNC Berkomitmen Dukung Kampanye Lingkungan Hidup. Website. (Akses 18 Maret 2013) dan tersedia di World Wide Web: <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/375298/>

Media Cetak Kompas. 2011. 19 Desember 2011. Media Award 2011 dan Status Lingkungan Hidup Indonesia (Akses pada 7 Maret 2013) dan tersedia di World Wide Web: <http://www.menlh.go.id/kompas-meraih-dua-penghargaan/>

MediaOnline Kompas. 2013. 18 Mei 2013. Semarang Ayo Hijaukan Sekolahmu! (Akses pada 10 Juli 2013) dan tersedia di World Wide Web: <http://www.kompasmuda.com/Berita/TabId/189/ArtMID/711/ArticleID/207/Hutan-Sekolah.aspx>

Media Online Kompas. 2012. 5 Desember 2012. Ekspedisi Cincin Api, Wartawan Kompas Terima Anugerah Adiwarta (Akses pada 10 Juli 2013) dan tersedia di World Wide Web:

<http://sains.kompas.com/read/2012/12/05/09254128/Wartawan.Kompas.Terima.Anugerah.Adiwarta>

Tribun Online. 2012. 4 Juni 2012. UIN Alauddin Tuan Rumah Kegiatan Kompas (Akses pada 10 Juli 2013) dan tersedia di World Wide Web:

<http://makassar.tribunnews.com/2012/06/04/uin-alauddin-tuan-rumah-kegiatan-kompas>

Tribun Online. 2013. 7 April 2013. Bike For Nature (Akses pada 10 Juli 2013) dan tersedia di World Wide Web:

<http://manado.tribunnews.com/2013/04/07/sekitar-7500-peserta-bersepeda-di-bike-for-nature-harian-kompas>





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di SKH Kompas

No	Judul Berita	Tanggal Dimuat	Dimuat di
1	Jantung Borneo Tambang dan Kebun Ancam Hutan	16 Februari 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
2	Perubahan Kedua Berpotensi Terjadi Lagi, UU Pemberian Izin Baru	20 Februari 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
3	Kelembagaan REDD+ Disiapkan Penegakan Hukum Multiaspek	20 Februari 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
4	Kehutanan Menhut: Penetapan Balik Ke Aturan Lama	28 Februari 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
5	Manajemen Kehutanan Tebang Pilih dan Tanam Jalur Diperlukan	29 Februari 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
6	Biodirvesitas, Greenpeace Laporkan Dugaan Perusakan Hutan	3 Maret 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
7	Tata Kelola Kehutanan, Evaluasi Moratorium 5 April	9 Maret 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
8	Daratan NTT Rawan Menjadi Gurun	10 Maret 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
9	Hutan Lindung Rencana Tata Ruang Kalimantan Dipertanyakan	12 Maret 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
10	Ekspansi Lahan Tidak Terhindarkan	14 Maret 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
11	TN Sembilang Jadi Kawasan Burung Mingran	20 Maret 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
12	Pesat Terdampak Perkebunan Sawit	21 Maret 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
13	Kasus Rawa Tripa, Buruk Bagi	21 Maret 2012	Rubrik Lingkungan

	Ekosistem Gambut		dan Kesehatan
14	Hutan Sumatera Semakin Kritis	16 April 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
15	Perambahan Hutan, Ngaku Miskin Punya Lahan 100 Hektar	16 April 2012	Halaman Utama
16	Alih Fungsi Hutan Lahirkan Konflik	17 April 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
17	Areal Rawa Tripa Diminta Dikembalikan	17 April 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
18	Pilkada Jadi Ajang Obral Perizinan	18 April 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
19	Kerusakan Hutan Terbaikan, Pemerintah Pusat dan Daerah Saling Lempar Tanggung Jawab	20 April 2012	Halaman Utama
20	Perlu Perketat Pengawas Hutan	20 April 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
21	Masyarakat Penyanggah Tidak Pernah Dilibatkan	21 April 2012	Halaman Utama
22	Hutan Yang Tersisapun Terus Tergerus	21 April 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
23	Penegakan Hukum Didesakkan	25 April 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
24	Moratorium Jadi Pertahanan Terakhir	1 Mei 2012	Rubrik Nusantara
25	Kasus Rawa Tripa Mulai Diselidiki	3 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
26	Izin dan Kebakaran Dipermasalahan	7 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
27	Kebakaran Masih Sulit Dihindari	9 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
28	Rawa Tripa Terancam Hancur	12 Mei 2012	Rubrik Lingkungan

			dan Kesehatan
29	50 Hektar Gambut Terbakar di Meulaboh	14 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
30	Pekan Depan Pemeriksaan Saksi Perusahaan	19 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
31	Rawa Tripa Kembali Dimoratorium	22 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
32	Lingkungan Terancam, Usaha Tambang dan Perkebunan Memicu Alih Fungsi Lahan	23 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
33	Izin Sawit Akan Dicabut	24 Mei 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
34	Laksanakan Komitmen Kelestarian Lingkungan	8 Juni 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
35	Sawit, Temu Greenpeace- Presiden	8 Juni 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
36	Riset dan Standar Deforestasi Selamatkan Lahan	13 Juni 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
37	Gambut Tnggal 20 Juta Hektar	29 Juni 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
38	Gambut Tergredasi Hingga 50 Persen	30 Juni 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
39	Hujan Buatan Terkendala	3 Juli 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
40	UKP 4 Rekomendasikan Pencabutan Izin Kebun Sawit di Tripa	5 Juli 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
41	Kebakaran Masih Terjadi di Rawa Tripa	6 Juli 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
42	Kasus Rawa Tripa Tunggu Respon Gubernur	20 Juli 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan

43	Laju Deforestasi Ditekan	24 Juli 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
44	10 Agustus Mulai Hujan Buatan di Riau	3 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
45	Prioritas Masyarakat sekitar REDD+	6 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
46	Pengampunan Indikasi Ketidakmampuan	9 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
47	Sebulan, Tak Ada Pemohon Izin Kemenhut	10 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
48	Penerbitan PP No 60 Berpotensi Konflik	13 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
49	Bubuk Garan Akan Ditaburkan di Riau	14 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
50	Menteri LH Ajukan Surat Kuasa Khusus	15 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
51	Kering, Tiga Gunung Terbakar	23 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
52	Giliran Hutan di Gunung Kelud Terbakar	24 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
53	Kebakaran Lahan, Titik Api di Sejumlah Daerah	24 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
54	Di Riau dan Palangkaraya Akan Disemai Hujan Buatan	25 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
55	Kebakaran di Hutan Ancam Satwa Langkah	25 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
56	Titik Api Terpantau Makin Banyak di Kalimantan	27 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
57	Kebakaran Bisa Rusak Sumber Air	28 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan

58	Ratifikasi Agar Jaga Kedaulatan	30 Agustus 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
59	Pengadilan Perintahkan Gubernur Cabut Izin	6 September 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
60	Susur Hutan Tiga Provinsi di Kalimantan	15 September 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
61	Kasus Rawa Tripa, pulihkan Seluruh Kesatuan Ekosistem	24 September 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan
62	Kebakaran Hutan Gunung Lawu Meluas	26 September 2012	Rubrik Nusantara
63	Masker Hanya Solusi Sementara	26 September 2012	Rubrik Lingkungan dan Kesehatan

Sumber Kerusakan Hutan di Sumatera

1. Pemberian hak pakai hutan.
2. Perambahan hutan oleh penduduk.
 - Jarak hutan terduduki dengan permukiman.
 - Kemungkinan penguasaan hutan.
 - Keberadaan GAO yang menawarkan lahan hutan dengan harga murah.
3. Perubahan status hutan sehingga lahan bisa diadikahi hak milik, ataupun diperjualbelikan.
 - Hutan telah menjadi lokasi pemukiman penduduk dan daerah defraksi.
 - Kebijakan pemerintah yang mengesampingkan kepentingan pemilik modal/industri.
4. Arah fungsi hutan untuk perkotaan dan pertanian.
 - Persebaran.
 - Kepentingan investor lebih dikecualikan.
 - Penambahan teta ruang yang milyon.
5. Pemertajahan liar.

Kerusakan Hutan di Sumatera sejak 2011



Hutan Sumatera Semakin Kritis

Pemda Ramai-ramai Usulkan Alih Fungsi Hutan

JAMBI, KOMPAS – Perusakan dan penghancuran hutan di Pulau Sumatera semakin parah. Kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan taman nasional yang seharusnya dilindungi malah dirambah untuk pengambilan kayu, perkebunan, dan penambangan.

Berdasarkan pantauan *Kompas* selama sepekan di sejumlah daerah di Sumatera, aktivitas itu umumnya dilakukan pemodal besar dengan melibatkan pejabat aparat, dan masyarakat setempat.

Di Provinsi Jambi, misalnya, luas hutan di wilayah yang semula mencapai 2,2 juta hektar kini hanya tersisa sekitar 500.000

hektar. Areal lebih kurang 17 juta hektar telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan kawasan pertambangan. Selain itu, sedikitnya 350.000 hektar hutan juga hancur akibat pembalakan liar.

Di Provinsi Lampung, sekitar 65 persen atau 650.000 hektar dari 1.004 juta hektar hutan da-

lan kondisi rusak. Kehancuran ini semata-mata dipicu maraknya perambahan. "Saat ini hutan lindung, hutan konservasi, apalagi hutan produksi tidak ada yang bebas dari perambahan. Perambahan di hutan produksi akhir-akhir ini meningkat," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Waristo.

Kondisi serupa terjadi di Bengkulu. Kawasan yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu seluas 45.345 hektar kini sekitar 27.262 atau 61 persen di antaranya dirambah. Di Taman Burau Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Seluma, misalnya, perambahan telah mencapai

1 hektar. 745.900 hektar lahan berahli fungsi menjadi wilayah pertambangan dengan jumlah izin 109 buah 351.230 hektar hutan kini berstatus konsesi lahan perkebunan dengan jumlah izin HGU 236 buah.

2. Nagan Raya, Aceh: konversi 5.769 ha hutan gambut primer menjadi perkebunan kelapa sawit di Rawa Tripa.

3. Simeulue, Aceh: Perambahan liar mencapai 44.422 hektar.

4. Sumatera Utara: Pemprov Sumut meminta Kementerian Kehutanan melepaskan 0,5 juta hektar hutan menjadi nonhutan.

5. Langkat, Sumatera Utara: Alih fungsi 700 ha hutan bakau menjadi perkebunan sawit.

6. Sialk, Riau: Penambangan ilegal kayu ramu untuk bahan baku industri kertas di Perawang. Sedikitnya 180.000 hektar hutan gambut di Sumatera hancur di konsesi perkebunan.

7. Jambi: Dalam 15 tahun terakhir, 4 lokasi hutan alam berubah menjadi HTI untuk memenuhi kebutuhan tanaman industri akasia, pertukangan, dan karet. Lebih dari 1 juta hektar hutan produksi dan hutan produksi terbatas dialihkann menjadi kebun sawit swasta dan BUMI serta areal tanaman industri.

iti at

1- 1534 hektar dari 9036 hektar.

1- Peramban itu dilakukan 202

1- keluar yang menemani lahan

1- dengan kopi, karet, kakao, dan

1- kelapa sawit.

1- Kersakan hutan di Provinsi

1- Aceh juga meningkat. Di provinsi

1- itu, sejak 2006 kersakan hutan

1- rata-rata 32.200 hektar per ta-

1- hun. "Yang paling menyedihkan,

1- banyak hutan yang rusak itu ma-

1- sarak Kawasan Ekosistem Leuser

1- (KEL) yang seharusnya dilin-

1- dungi karena penting bagi ke-

1- seimbangan ekosistem dan supplai

1- air di Aceh," ujar Direktur Waha-

1- na Lingkungan Hidup Indonesia

1- (Walhi) Aceh TM Zulfiar.

2009 masih 201 izin, tetapi terus

2011. Pemberian izin itu juga tak

2011 melihat status lahan yang hendak

2011 dialihfungsikan," tuturnya.

2011 Contohnya, pemberian izin

2011 HGU perkebunan oleh Gubernur

2011 Aceh pada Agustus 2011 untuk

2011 PT Kalista Alam di Rawa Gambut

2011 Tripas seluas 1.605 hektar. Izin

2011 itu menyahhi aturan karena

2011 seluruh areal berada dalam KEL

2011 wilayah Aceh. Padahal, KEL telah

2011 ditetapkan menjadi kawasan

2011 strategis nasional berdasarkan

2011 Peraturan Pemerintah Nomor 26

2011 Tahun 2008 tentang

2011 Rencana Tata Ruang

2011 Wilayah Nasional, bu-

2011 kan untuk perkebun-

tanah.

Provinsi Sumatera Selatan, mi-

72011 salnya, mengizinkan pelepasan

72011 hutan seluas 459.929 hektar. Usul

72011 itu meliputi 11.415 hektar hutan

72011 konservasi, 81.279 hektar hutan

72011 lindung, 94.852 hektar hutan

72011 produksi konservasi, dan 9.986

72011 hektar hutan konservasi perai-

72011 an. Jika usulan diterima, Sumsel

72011 kehilangan 12 persen hutan dari

72011 total 3,82 juta hektar.

72011 Menurut Kepala Dinas Kehu-

72011 tanan Provinsi Sumsel Sigit Wi-

72011 bowo, usul pelepasan kawasan

72011 hutan itu atas per-

72011 mintaan pemerintah

72011 kabupaten dan kota

72011 sebagai bagian dari

52000 hektar APL yang selama

ini dikelola masyarakat menjadi

hutan produksi. Akibatnya, kaw-

72011 an itu kemudian dikonversi men-

72011 jadi HTI yang pengelolannya

72011 diserahkan kepada PT Wira Kar-

72011 ya Sakti, anak usaha Sinar Mas

72011 Forestry.

72011 Padahal, di dalam kawasan ter-

72011 sebut terdapat banyak permu-

72011 kiman dan kebun masyarakat de-

72011 ngan empat desa. Konflik antara

72011 masyarakat dan perusahaan pun

72011 tidak terhindarkan. Empat bulan

72011 lalu, 500 warga Senyerang men-

72011 duduki areal itu. "Kami hanya

72011 menuntut pengembalian lahan

72011 agar masyarakat bisa kembali

72011 menanani," tutur Asnawi, pem-

Penurunan status hutan men-

jadi APL melalui peninjauan

ulang tata ruang tersebut, me-

72011 nurut Direktur Komunitas Kon-

72011 servasi Indonesia Warsi Beng-

72011 kulu Nurkholis Sastro, merupa-

72011 kan akal-akalan pemerintah guna

72011 memenuhi kepentingan pemilik

72011 modal. "Setelah menjadi APL, pe-

72011 merintah jelusa, memberikan

72011 izin pemanfaatan, kepada perusa-

72011 haan perkebunan atau tambang,"

72011 kata Sastro.

72011 "Usulan pelepasan hutan itu

72011 jangan dikabulkan. Pelepasan itu

72011 hanya mempercepat laju kenu-

72011 sakan hutan karena tak ada per-

72011 lindungan lagi," ujar Direktur

72011 Walhi Sumsel Anwar Sadat.

DTA/ADH/JON/IRE/MSI/HAN)

Sawit dan tambang

Zulfiar menegaskan, investasi

sektor perkebunan kelapa sawit

dan pertambangan menjadi pe-

nyebab utama kerusakan hutan.

Berdasarkan data Dinas Pertam-

2011 bangan dan Energi Provinsi Aceh

2011 tahun 2011, tidak kurang dari

2011 351.232,816 hektar lahan di Aceh

2011 kini dalam status konsesi untuk

2011 lahan perkebunan, dengan 236

2011 izin hak guna usaha (HGU). Ke-

2011 mudian, 745.980,93 hektar telah

2011 beralih fungsi menjadi wilayah

2011 pertambangan dengan 109 izin.

2011 Rekomendasi dan izin diter-

2011 bitkan pemerintah kabupaten

2011 dan provinsi. "Jumlah perizinan

2011 untuk HGU perkebunan pada

2011 2009 masih 201 izin, tetapi terus

2011 2011. Pemberian izin itu juga tak

2011 2011 melihat status lahan yang hendak

2011 2011 dialihfungsikan," tuturnya.

2011 2011 Contohnya, pemberian izin

2011 2011 HGU perkebunan oleh Gubernur

2011 2011 Aceh pada Agustus 2011 untuk

2011 2011 PT Kalista Alam di Rawa Gambut

2011 2011 Tripas seluas 1.605 hektar. Izin

2011 2011 itu menyahhi aturan karena

2011 2011 seluruh areal berada dalam KEL

2011 2011 wilayah Aceh. Padahal, KEL telah

2011 2011 ditetapkan menjadi kawasan

2011 2011 strategis nasional berdasarkan

2011 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 26

2011 2011 Tahun 2008 tentang

2011 2011 Rencana Tata Ruang

2011 2011 Wilayah Nasional, bu-

2011 2011 kan untuk perkebun-

2011 2011 an.

2011 2011 Izin usaha, tambang

2011 2011 juga terus meningkat

2011 2011 dari 10 izin pada 2009

2011 2011 menjadi 109 izin tahun

2011 2011 2011. Lebih parah lagi,

2011 2011 68 izin di antaranya berada da-

2011 2011 lam kawasan hutan lindung dan

2011 2011 KEL. "Jumlah izin ini akan terus

2011 2011 bertambah karena adanya pem-

2011 2011 bukaan keran investasi besar-be-

2011 2011 saran oleh daerah," ujar Zulfi-

2011 2011 kar.

2011 2011 Beberapa pemerintah daerah

2011 2011 di Sumatera beramai-ramai me-

2011 2011 minta pelepasan status kawasan

2011 2011 hutan menjadi areal penggunaan

2011 2011 lain kepada Kementerian Kehu-

2011 2011 tanan.

2011 2011 Provinsi Sumatera Selatan, mi-

2011 2011 salnya, mengizinkan pelepasan

2011 2011 hutan seluas 459.929 hektar. Usul

2011 2011 itu meliputi 11.415 hektar hutan

2011 2011 konservasi, 81.279 hektar hutan

2011 2011 lindung, 94.852 hektar hutan

2011 2011 produksi konservasi, dan 9.986

2011 2011 hektar hutan konservasi perai-

2011 2011 an. Jika usulan diterima, Sumsel

2011 2011 kehilangan 12 persen hutan dari

2011 2011 total 3,82 juta hektar.

2011 2011 Menurut Kepala Dinas Kehu-

2011 2011 tanan Provinsi Sumsel Sigit Wi-

2011 2011 bowo, usul pelepasan kawasan

2011 2011 hutan itu atas per-

2011 2011 mintaan pemerintah

2011 2011 kabupaten dan kota

2011 2011 sebagai bagian dari

2011 2011 proses revisi rencana

2011 2011 tata ruang wilayah

2011 2011 nasional. Jika telah

2011 2011 menjadi areal peng-

2011 2011 gunakan lain (APL),

2011 2011 kawasan tersebut bi-

2011 2011 sa dijadikan hak milik atau di-

2011 2011 perjualbelikan.

2011 2011 "Saat ini usulan itu masih me-

2011 2011 nunnggu persetujuan," tuturnya.

2011 2011 Di Sumatera Utara, pemerin-

2011 2011 tah sempat mengusulkan per-

2011 2011 ubahan status hutan seluas

2011 2011 564.200,36 hektar untuk menjadi

2011 2011 kawasan bukan hutan. Pemerin-

2011 2011 tah Provinsi Bengkulu mengusul-

2011 2011 kan 90.000 hektar menjadi APL.

2011 2011 Sebaliknya, Pemerintah Kabu-

2011 2011 paten Tanjung Jabung Barat,

2011 2011 Jambi, justru menaikkan status

2011 2011 52000 hektar APL yang selama

2011 2011 ini dikelola masyarakat menjadi

2011 2011 hutan produksi. Akibatnya, kaw-

2011 2011 an itu kemudian dikonversi men-

2011 2011 jadi HTI yang pengelolannya

2011 2011 diserahkan kepada PT Wira Kar-

2011 2011 ya Sakti, anak usaha Sinar Mas

2011 2011 Forestry.

2011 2011 Padahal, di dalam kawasan ter-

2011 2011 sebut terdapat banyak permu-

2011 2011 kiman dan kebun masyarakat de-

2011 2011 ngan empat desa. Konflik antara

2011 2011 masyarakat dan perusahaan pun

2011 2011 tidak terhindarkan. Empat bulan

2011 2011 lalu, 500 warga Senyerang men-

2011 2011 duduki areal itu. "Kami hanya

2011 2011 menuntut pengembalian lahan

2011 2011 agar masyarakat bisa kembali

2011 2011 menanani," tutur Asnawi, pem-

2011 2011 ka masyarakat Senyerang.

2011 2011 Penurunan status hutan men-

2011 2011 jadi APL melalui peninjauan

2011 2011 ulang tata ruang tersebut, me-

2011 2011 nurut Direktur Komunitas Kon-

2011 2011 servasi Indonesia Warsi Beng-

2011 2011 kulu Nurkholis Sastro, merupa-

2011 2011 kan akal-akalan pemerintah guna

2011 2011 memenuhi kepentingan pemilik

2011 2011 modal. "Setelah menjadi APL, pe-

2011 2011 merintah jelusa, memberikan

2011 2011 izin pemanfaatan, kepada perusa-

2011 2011 haan perkebunan atau tambang,"

2011 2011 kata Sastro.

2011 2011 "Usulan pelepasan hutan itu

2011 2011 jangan dikabulkan. Pelepasan itu

2011 2011 hanya mempercepat laju kenu-

2011 2011 sakan hutan karena tak ada per-

2011 2011 lindungan lagi," ujar Direktur

2011 2011 Walhi Sumsel Anwar Sadat.

2011 2011 DTA/ADH/JON/IRE/MSI/HAN)

2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011 2011

2011 2011

Gambut Tinggal 20 Juta Hektar

BOGOR, KOMPAS — Luas hutan dan lahan gambut di Asia Tenggara diperkirakan tinggal 20 juta hektar. Indonesia memiliki lahan terluas, 15 juta hektar. Umumnya, regulasi konservasi cukup baik, tetapi implementasinya belum tepat.

"Regulasi Indonesia, hanya gambut yang memiliki kedalaman kurang dari tiga meter dapat dimanfaatkan sudah cukup baik," kata Senior Technical Advisor pada ASEAN Peatland Forests Project Faizal Parish pada lokakarya "Enhancing Sustainability of Forestry Practises on Peatland" Rabu (27/6), di Bogor.

Luas gambut di Asia Tenggara selebihnya di Malaysia 2,5 juta hektar, Brunei 100.000 hektar, Thailand 60.000 hektar, Vietnam 3.000 hektar, Filipina 11.000 hektar, Myanmar 3.500 hektar, dan Laos 20.000 hektar. Lokakarya selama dua hari di Bogor untuk merumuskan kegiatan apa yang

bermanfaat dan diperbolehkan di gambut.

Kebijakan moratorium (jeda perizinan) pemanfaatan hutan primer dan gambut di Indonesia seluas 63 juta hektar yang memasuki tahun kedua, menurut Faizal, sangat menunjang konservasi. Hal itu terutama untuk hidrologi lahan gambut.

"Adapun implementasi yang tak tepat adalah kebijakan seperti terjadi di Rawa Tripa, Aceh," kata Faizal. Ia mengingatkan, ada kemungkinan saat ini masuk fase El Nino sehingga terjadi kemarau berkepanjangan tahun ini hingga 2013. Kebakaran sangat mungkin timbul akibat kesalahan pengelolaan gambut.

Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Lingkungan dan Perubahan Iklim Arief Yuwono mengatakan, gambut yang tersisa di Indonesia saat ini tak boleh dimanfaatkan. Pengusahaan gam-

but untuk industri perkebunan yang sudah telanjur, seperti untuk tanaman industri dan kelapa sawit, diharapkan dikelola secara berkelanjutan.

Faizal yang berasal dari Malaysia mengatakan, di Malaysia tidak ada kebijakan pembatasan pemanfaatan gambut dengan kedalaman kurang dari tiga meter. Pemanfaatan dibolehkan pada tepian suatu ekosistem kubah gambut dengan penetapan zona penyangga minimal 500 meter untuk menjaga hidrologi gambut.

Deputi Bidang Jaringan Data Spasial pada Kementerian Kehutanan Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, identifikasi kubah gambut sangat diperlukan. Sekarang ini belum dimiliki data spasial gambut dengan pemetaan paling akurat 1:50.000.

"Peta gambut secara spasial harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Ruandha. (NAW)

KASUS RAWA TRIPA Penegakan Hukum Didesakkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah didesak menginvestasi dan menegakkan hukum terkait penggunaan lahan gambut sebagai kebun sawit di Rawa Tripa, Aceh. Satgas REDD+ menuduh indikasi pelanggaran perundang-undangan.

"Temuan Satgas REDD+ harus menjadi dasar dan disertai para penegak hukum dalam memproses kasus Rawa Tripa," ucap Dede Suhendra, unsur pimpinan Program WWF Indonesia di Aceh, Senin (23/4), dihubungi dari Jakarta.

Kasus Rawa Tripa preseden bagi pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang melalui PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memasukkan Rawa Tripa sebagai Kawasan Strategis berfungsi lindung.

Investigasi mendalam dan komprehensif akan jadi gambaran faktual Rawa Tripa. Hasilnya, jadi dasar kebijakan menyeluruh ekosistem gambut itu.

Sementara itu, 18 April 2012, Program Konservasi Orangutan, Sumatera (SOCP), Yayasan Ekosistem Leuser, dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menyelenggarakan oranganutan di hutan gambut Rawa Tripa. "Kami melihat oranganutan ini tiga bulan lalu. Kini, 30 persen berat tubuhnya menyusut. Bisa mati kelaparan," ucap Yenny Saraswati dari SOCP.

Temuan ini menunjukkan Rawa Tripa tertekan perkembangan sawit yang masif. Indranto dari Yayasan Ekosistem Leuser mengatakan, bila kondisi ini dibiarkan, kian banyak oranganutan ditangkap/dibunuh dan diperdagangkan. Oranganutan kelaparan menyerang kebun sawit untuk memakan pucuk sawit

muda.

Kasus Rawa Tripa muncul setelah perusahaan perkebunan sawit diizinkan meluaskan usahanya 1.605 hektar oleh Gubernur Aceh. Wahana Lingkungan Hidup Aceh mengugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Sidang 3 April 2012, gugatan ditolak.

Pada 13 April 2012, Ketua Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto merekomendasikan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian Negara RI segera menginvestigasi menyeluruh dan mengambil tindakan hukum. Temuan awal Satgas REDD+, pemberian izin mengindikasikan pelanggaran UU No 18/2004 tentang Perkebunan, UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang *juncto* Keppres No 32/1990 tentang Kawasan Lindung (CCH)

KERUSAKAN LINGKUNGAN

Rawa Tripa Terancam Hancur

NAGAN RAYA, KOMPAS — Rawa Gambut Tripa terancam hancur. Lahan yang semula di wilayah Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, Aceh, itu tiap tahun menurun rata-rata lima sentimeter per tahun. Dari luas semula 62.000 hektar, kini tersisa 11.504,3 ha.

Ekspansi lahan sawit dan pembakaran lahan menjadi penyebab utama kehancuran hutan gambut di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) itu. "Saat ini, ketinggian rata-rata rawa gambut ini sama dengan permukaan laut. Jika terus menurun lima sentimeter, dalam 25 tahun ke depan akan turun 1,5 meter. Artinya, rawa akan tenggelam dan hilang," kata Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nagan Raya Hariyanti Nova, Jumat (11/5).

Sejak tahun 2010, hutan rawa gambut Tripa dimasukkan ke KEL, yang semestinya dilindungi

dan tak diperuntukkan bagi perkebunan. Saat sudah masuk ke KEL, kondisi rawa habitat flora dan fauna paling beraneka ragam di Sumatera itu sudah rusak.

Izin hak guna usaha bagi perusahaan-perusahaan sawit ada sejak tahun 1980. Dari luas semula 62.000 ha, tahun 1998 tersisa 35.000 ha karena mayoritas beralih fungsi menjadi lahan sawit. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kian cepat hingga tinggal 11.504,3 ha.

"Vegetasinya dibabat dan diganti sawit. Lahan gambut yang berair pun kering. Apalagi, perusahaan-perusahaan sawit itu membuat kanal-kanal. Tanah gambut menyusut. Kondisi makin parah karena ada pembakaran untuk pembukaan lahan. Akibatnya, tanah gambut terus menyusut," kata Hariyanti.

Pekakan lalu, penyidik Kementerian Lingkungan Hidup, Mar-kas Besar Kepolisian Negara RI,

dan Kejaksaan Agung mendatangi langsung lahan milik dua perusahaan. Keduanya dalam proses penyelidikan seuseai dibuat berita acara pemeriksaan.

Penurunan lahan

Pemantau hutan gambut Tripa dari Yayasan Ekosistem Leuser, Indriyanto, mengatakan, pada tahun 2008, YEL pernah meneliti penurunan lahan di Tripa. Periode 2008-2012 terjadi penurunan hingga 20 cm. "Artinya, pada tahun 2037 gambut Tripa turun 160 sentimeter," katanya.

Hasil pencitraan satelit per 16 April 2012, luas hutan tersisa ada 11.504,3 ha. Kehancuran hutan minimum periode Januari-April 2012 mencapai 805,4 ha. Hutan yang sudah hancur sejak tahun 2009 hingga Desember 2011 seluas 5.069,9 ha.

"Jika terus terjadi, dalam tiga tahun, hutan rawa Tripa akan hilang," katanya. (HAN)

Rawa Tripa Kembali Dimoratorium

Konsistensi Pemerintah Disambut Positif Kelompok Sipil

JAKARTA, KOMPAS — Kawasan Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, kembali dimasukkan ke dalam revisi kedua peta moratorium. Luasan 1.605 hektar PT Kalista Alam untuk perkebunan kelapa sawit akan kembali dilindungi dari segala aktivitas penambangan atau pembukaan gambut.

Deputi Penegakan Hukum Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa, Senin (21/5), di Jakarta, mengatakan, segala kegiatan perusakan di areal perluasannya 1.605 hektar itu harus dihentikan. "Selain distop, kami juga akan kerahkan hukum," ucapnya.

Ia merinci kasus hukum yang disidik saat ini, yaitu indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena pembakaran lahan. Lalu,

UU No 18/2004 tentang Perkebunan karena beroperasi tanpa izin. UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya karena beroperasi di Kawasan Ekosistem Leuser.

Sebagai tambahan informasi, tim penyidik gabungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kepolisian Negara RI, dan Kelaksaan Agung kini sedang memeriksa saksi-saksi, termasuk dari perusahaan.

Selain hukuman pidana, UKP4 juga merekomendasikan agar KLH, mewakili negara, menuntut perusahaan membayar se-

jumlah ganti rugi atas kerusakan ekosistem setempat. Nilainya sedang dihitung KLH.

Ketika ditanya tentang sanksi kepada pemberi izin, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, akan ditelusuri tentang kemungkinan delik korupsi dan tata usaha negara. "Ini masih didalami. Yang jelas, pejabat yang salah bisa di-PTUN dan kalau korupsi, dipidanakan," ucapnya.

Disambut positif

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Elifhan Effendy yang telah konsisten memperjuangkan kawasan gambut Rawa Tripa dari ancaman perusahaan aktif ekspansi perkebunan sawit. "Konsistensi ini telah menyelamatkan habitat orangutan dan fungsi lindung gambut Rawa Tripa," imbuhnya.

Kasus ini bermula pada bulan

Agustus 2011 ketika Gubernur Aceh saat itu menandatangani izin usaha perkebunan bagi PT Kalista Alam. Padahal, pada bulan Mei 2011, areal 1.605 hektar yang diizinkan dibuka tersebut masuk dalam areal moratorium.

Namun, pada revisi pertama peta moratorium, bulan November 2011, areal ini dikeluarkan. Izin Gubernur Aceh ini kemudian digugat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Aceh ke PTUN Aceh. Majelis hakim saat itu memutuskan gugatan ditolak dan Walhi Aceh naik banding.

Isu ini tercium UKP4 dan merekomendasikan penyidikan menyeluruh atas kasus itu, termasuk penyelidikan di lapangan. Hasil investigasi menunjukkan belum ada hak guna usaha dan sejumlah pelanggaran lain, seperti pembakaran hutan gambut dan izin kedaluwarsa. (ICH)

Ratifikasi agar Jaga Kedaulatan

Dampak Asap Kebakaran Lahan Mulai Terasa

JAKARTA, KOMPAS — Ratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Asap Lintas Batas diingatkan agar tidak berdampak mengorbankan kedaulatan negara. Ketertinggalan teknologi infrastruktur pencegahan dan pemadaman api di Tanah Air bisa menjadi alasan negara tetangga leluasa masuk.

Ratifikasi pernah diusulkan pemerintah kepada DPR, tetapi ditolak tahun 2008. "Substansi penanganan asap kami setuju. Tapi, rambu-rambu kami, harus ada kontrol dari negara terkait mobilisasi teknologi atau sarana penanganan asap," kata Satya W Yudha, anggota Komisi VII DPR, Rabu (29/8), di Jakarta.

ASEAN sepakat membuat kewenangan bersama ketika muncul asap akibat kebakaran hutan/gambut. Satya meminta ada mekanisme/tata cara pengerahan infrastruktur dari negara tetangga ke wilayah RI.

Meskipun pemerintah menargetkan ratifikasi selesai September 2012, hingga kemarin, DPR belum menerima rancangan ratifikasi terbaru. DPR siap mencermati ada/tidak rambu-rambu itu pada usulan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuaya mendesak agar Persetujuan ASEAN tentang Asap Lintas Batas segera diratifikasi

dalam perundang-undangan. Itu langkah awal mencari jalan keluar masalah kebakaran hutan/gambut yang terjadi tiap kemarau.

Targetnya, September 2012, persetujuan itu diwadahi dalam perundang-undangan. ASEAN menjadikan Indonesia tuan rumah kelompok kerja persetujuan itu, Oktober 2012, di Bali.

Tinggal Indonesia

Dari 10 anggota ASEAN, Indonesia adalah satu-satunya yang belum meratifikasi persetujuan itu. Persetujuan ASEAN tentang Asap Lintas Batas ditandatangani 10 negara pada 10 Juni 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan itu berlaku sejak 25 November 2003, setelah enam negara meratifikasinya.

"Kami minta Menko Kesra mendorong ratifikasi segera selesai. Kalau tidak, akan saya tunda itu (tuan rumah). Jangan di Indonesia, nanti dipertanyakan lagi," ujar Balthasar.

Keuntungan ratifikasi adalah akses sumber daya manusia dan peralatan di ASEAN dan luar ASEAN, untuk memantau dan tanggap darurat kebakaran hutan/lahan penyebab pencemaran asap lintas batas.

Arief Yuwono, Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, mengatakan, setiap kementerian terkait sepakat meratifikasi Persetujuan ASEAN. Prosesnya di Kementerian Luar Negeri.

Di Jambi, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan kian mengganggu jarak pandang. Pesawat belum diizinkan mendarat di Bandara Sultan Thaha, Jambi.

"Hingga pukul 11.00, kami belum merekomendasikan pesawat dari Jakarta mendarat di bandara Jambi," ujar Koordinator Bidang Pengkajian dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi Kurnianingsih.

Sementara itu, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hujan buatan hari pertama, Selasa lalu, berjalan lancar dengan tiga daerah menjadi sasaran. Selama 40 hari, hujan buatan dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan dan menekan kebakaran.

Di Purbalingga, Jawa Tengah, pemadaman kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet memanfaatkan jasa pawang hujan.

(BAY/ITA/GRE)

Hujan Buatan Terkendala

Dampak Kekeringan Diantisipasi di Banyak Daerah

JAKARTA, KOMPAS – Kekeringan dan kebakaran hutan serta kekeringan waduk saat kemarau ini membutuhkan intervensi hujan buatan. Namun, hujan buatan yang diminta sejumlah daerah tak bisa serentak karena keterbatasan sarana prasarana.

Permintaan hujan buatan dari sejumlah daerah biasanya dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. "Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional meminta kami bersiaga pada musim kemarau ini," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Heru Widodo dihubungi di Malang, Jawa Timur, Senin (2/7).

Siaga perlu karena hampir semua wilayah di Indonesia tak lagi turun hujan. Beberapa prakiraan cuaca menyebutkan, Indonesia mengarah ke El Nino atau kemarau panjang berskala ringan hingga moderat.

Bulan lalu, tim BPPT membuat hujan buatan untuk mengisi Waduk Bakaru (Sulawesi Barat) yang dibutuhkan PLTA untuk menggerakkan turbin serta mengisi Daerah Aliran Sungai Ci-

tarum. Saat ini, mereka masih bekerja di Waduk Koto Panjang (Riau) dan Danau Singkarak.

Permintaan lain dari PLN adalah mengisi Waduk Riam Kanan di Kalimantan Selatan yang akan dilakukan Oktober 2012. Hujan buatan butuh awan *cumulus* berjumlah cukup di atmosfer.

"Kami juga diminta menyiapkan diri mengamankan Pekan Olahraga Nasional Riau (mulai September 2012) dari ancaman kebakaran hutan yang asapnya mengganggu kegiatan," katanya.

Kendala

Meski permintaan hujan buatan bakal tinggi, BPPT terkendala jumlah pesawat pembuat hujan. Saat ini, jumlahnya hanya lima unit. "Kalau kondisi sangat darurat, ada TNI Angkatan Udara yang bisa membantu," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat

Informasi, Data, dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi dampak kemarau. "Kami tak ingin kecolongan bencana kekeringan, baik kebakaran lahan maupun krisis air," ucapnya. Untuk itu, BNPB berkoordinasi dengan BMKG, Lapan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan.

Rencana menyeluruh disiapkan di delapan provinsi langganan kebakaran lahan, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. "Rencana delapan helikopter dengan *bumby bucket* (wadah air) akan ditempatkan di provinsi itu," ucapnya.

Saat ini, dua helikopter disiagakan di Sumsel dan Riau.

Akhir-akhir ini, kesulitan air telah terjadi di Banjarnegara, Cilacap, Brebes (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), Sungai Musi (Sumsel), dan Sungai Kapuas (Kalbar). Dampaknya telah dirasakan petani dan perusahaan yang menggantungkan lalu lintas suplai dari sungai. (ICH)

Laju Deforestasi Ditekan

Kementerian Kehutanan Sedang Menghitung

BOGOR, KOMPAS — Laju penggundulan hutan di Indonesia saat ini 0,45 juta hektar per tahun. Hal ini merupakan penurunan terbesar angka deforestasi yang pernah mencapai 3,5 juta hektar pada tahun 1996-2000. Upaya penurunan dilakukan bertahap. Tahun 2003-2006 terjadi penurunan 1,2 juta hektar.

Yuyu Rahayu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, Senin (23/7), di Bogor, Jawa Barat, mengatakan, penurunan laju deforestasi yang mencapai 675.000 hektar per tahun telah mengerem emisi senilai 489 juta ton karbon. Penurunan laju deforestasi ini didapatkan dari intensifikasi pengelolaan, pemberantasan penebangan kayu ilegal, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Jika dihitung nilai nominal kayu di lahan 675.000 hektar itu, angkanya bisa Rp 10 triliun. Perhitungannya, luasan itu menghasilkan 20 juta meter kubik kayu jenis terendah yang dihargai Rp 500.000 per meter kubik.

"Ini baru dari nilai kayu. Dari sisi lingkungan, seperti tangkap-

an air, kehidupan fauna, dan oksigen yang dihasilkan pohon, nilai lainnya tak terkira," kata Yuyu di sela-sela Workshop Allometric Equation.

Dihitung tersendiri

Yuyu mengatakan, angka emisi 489 juta hektar diperoleh menggunakan penghitungan umum yang disepakati para ahli perubahan iklim di tingkat internasional. Agar hasilnya lebih akurat untuk kondisi hutan Indonesia, Kementerian Kehutanan sedang merumuskan penghitungan tersendiri.

Perhitungan yang melibatkan peneliti biometri lintas kementerian dan perguruan tinggi diarahkan untuk menghitung karbon secara regional berdasarkan aspek geografis dan jenis spesies

tanaman. Menurut dia, langkah pemerintah ini untuk menguatkan posisi Indonesia di dunia internasional, salah satunya dalam negosiasi karbon dan iklim.

Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Kementerian Kehutanan Yetty Rusli menyatakan, hasil penghitungan kehutanan juga mendukung komitmen penurunan emisi 26-41 persen karbon. Komitmen ini dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan puncak G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat.

Yetty mengatakan, emisi dari sisi kehutanan hanya 18 persen. Mayoritas (77 persen) emisi berasal dari pembakaran energi fosil. Karena itu, selain penurunan laju deforestasi, diperlukan langkah untuk mengurangi penggunaan energi fosil.

Pelepasan emisi karbon melalui gas karbon dioksida ke udara menyebabkan perubahan iklim di sejumlah negara. Bagi Indonesia yang berbentuk kepulauan dan memiliki pantai sangat luas, perubahan iklim akan signifikan memengaruhi kehidupan masyarakat. (ICH)

IZIN SAWIT AKAN DICABUT

Thursday, 24 May 2012 00:00 | Written by KOMPAS |

Kasus Rawa Tripa Bisa Terjadi di Sejumlah Daerah

Jakarta, - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Rabu (23/5), memastikan pencabutan izin usaha perkebunan sawit seluas 1.605 hektar di lahan gambut Rawa Tripa, Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh. Kepala daerah diminta berhati-hati sebelum menerbitkan izin alih fungsi lahan.

"Saya sudah ketemu Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah dan (wakil) Muzakir Manaf. Akan dicabut izinnya setelah dilantik," ucap Zulkifli Hasan di Jakarta, kemarin. Pasangan akan dilantik pada 4 Juni 2012.

Di Banda Aceh, Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah, mengatakan, pihaknya siap menghentikan pemberian izin pembukaan lahan perkebunan kepada perusahaan yang terbukti melanggar undang-undang dan mengancam kelestarian hutan. Hal itu juga berlaku untuk PT Kalista Alam di Rawa Tripa, Nagan Raya.

"Instruksi presiden jelas bahwa itu (Rawa Tripa) masuk Kawasan Ekosistem Leuser, kawasan hutan lindung. Instruksi presiden menyatakan harus diberhentikan. Ke depan, kami akan beri perhatian, izin-izin yang tak sesuai inpres akan kami stop," ujar Zaini.

Kasus berawal dari izin Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) kepada PT Kalista Alam untuk menggunakan 1.605 hektar untuk perkebunan sawit, Agustus 2011. Kebijakan itu dikecam sejumlah pihak karena diberikan saat Indonesia menghentikan sementara izin-izin baru di kawasan hutan dan lahan gambut. Rawa Tripa termasuk gambut padat yang kaya keanekaragaman hayati dan termasuk Kawasan Ekosistem Leuser.

Kasus ini sampai ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang merekomendasikan investigasi. Hasilnya, ditemukan indikasi pembakaran hutan dan kerusakan ekosistem gambut.

Menurut Zulkifli, lahan 1.605 ha di Rawa Tripa itu berstatus areal penggunaan lain. Artinya, kewenangan penggunaan ada pada pemerintah daerah, bukan Kementerian Kehutanan.

Karena itu, ia meminta kepala daerah berhati-hati menerbitkan izin di areal yang dilindungi. "Saya dulu, tahun 2009, teken saja (izin-izin) karena tak mengerti. Sekarang, buka dulu petanya, masuk daerah dimoratorium atau tidak," ucapnya.

Tinjau ulang

Deddy Ratih dari Walhi mengatakan, lahan 1.605 ha itu bagian kecil dari perkebunan lain di lahan gambut Kawasan Ekosistem Leuser. Ia mendesak perizinan ditinjau ulang.

Heru Prasetyo, Deputi I UKP4, mengingatkan, kesemrawutan izin Rawa Tripa bisa terjadi di sejumlah daerah. Ia mengajak organisasi sipil lebih aktif mengontrol serta mengawasi hutan dan gambut.

Momen moratorium atau jeda penerbitan izin di kawasan hutan dan gambut diharapkan menjadi ajang perbaikan pengelolaan sumber daya di Indonesia. "Presiden sendiri yang meminta pelaksanaan moratorium di-monitoring," ucap Heru. (ICH/HAN)

Sumber : <http://cetak.kompas.com/read/2012/05/24/05184445/izin.sawit.akan.dicabut>

MANAJEMEN KEHUTANAN

Tebang Pilih dan Tanam Jalur Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Tebang pilih dan tanam jalur didorong Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menyelamatkan biodiversitas hutan dengan tetap mempertahankan kepentingan industri perkebunan. Pemerintah mendorong tegas menerapkan kebijakan tersebut untuk perlindungan dan manajemen kehutanan.

"Kami riset bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan beberapa ahli dari Jepang. Manajemen kehutanan harus mampu menyelamatkan biodiversitas, selain mengambil manfaat hutan, seperti perkebunan," kata Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bambang Subiyanto, Selasa (28/2) di Jakarta.

Ia mengatakan, riset mengenai umur optimum pohon kayu produktif sekarang juga masih kn-

rang. Padahal, data seperti itu dibutuhkan untuk program tebang pilih.

Selain itu, tanam jalur merupakan pilihan untuk tidak merusak suatu habitat atau ekosistem. Perhindungan seperti itu dibutuhkan untuk kepentingan konservasi atau riset yang bisa menghasilkan manfaat, selain kayu dari hutan.

Salah satu bentuk kerja sama LIPI dan UGM beserta beberapa ahli dari Jepang saat ini untuk mempertahankan pohon meranti di hutan alam, selain untuk mengentalkan riset penanaman meranti yang mempunyai kualitas seperti dari hutan alam.

"Selama ini meranti merupakan jenis pohon kayu keras yang sulit ditanam. Tetapi, sekarang sudah bisa ditemukan metode penanaman meranti," kata Bambang

menjelaskan.

Andil pemerintah

Penyelamatan biodiversitas, terutama jenis-jenis tanaman endemik sekarang dibutuhkan. Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor LIPI Mustaid Shegar mengatakan, pemerintah daerah sangat diharapkan turut andil dalam upaya perlindungan berbagai jenis tumbuhan endemik di wilayah masing-masing.

"Pembentukan kebun raya di berbagai daerah, salah satunya adalah dengan prioritas menyelamatkan tumbuhan endemik," kata Mustaid.

Lokasi kebun raya dapat secara bertahap dengan hutan alam. Melalui cara itu, berbagai jenis tumbuhan yang endemik dapat diselamatkan dengan kondisi ekologi yang sama. (NANW)

PELESTARIAN ALAM

TN Sembilang Jadi Kawasan Burung Migran

PALEMBANG, KOMPAS — Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan dinyatakan sebagai lokasi burung migran. Lokasi ini yang kedua di Indonesia setelah Taman Nasional Wasur di Papua dan lokasi ke-108 di dunia. Status sebagai lokasi burung migran dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan pelestarian burung-burung migran ataupun kawasan itu.

Demikian ditegaskan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat membuka The Sixth Meeting of Partners of the East Asian-Australasian Flyway Partnership yang dihadiri wakil dari organisasi pemerhati burung dari Indonesia dan 13 negara dalam kemitraan burung migran di Pa-

lembang, Sumsel, Senin (19/3).

"Status sebagai lokasi burung migrasi ini berarti lokasi itu harus dijaga. Jangan sampai, misalnya, diubah fungsi menjadi perkebunan sawit. Di samping itu, meningkatkan perlindungan agar masyarakat tak membunuh burung-burung," kata Zulkifli.

Taman Nasional (TN) Sembilang merupakan salah satu titik persinggahan dalam jalur migrasi burung East Asian-Australasian Flyway. Setiap tahun, sekitar 5 juta burung air bernegara dengan titik persinggahan 700 lokasi itu. Namun, baru 13 negara yang tergabung dalam kemitraan perlindungan jalur migrasi itu dengan lokasi 108 titik.

Di Indonesia, ada tujuh lokasi di jalur itu. Indonesia mempunyai 1.598 jenis burung, 380 jenis di antaranya burung air.

Di TN Sembilang, ribuan burung migran berdatangan pada September-Oktober. Sebagian tinggal sepanjang tahun untuk membesarkan anaknya.

Pengakuan dunia

Agus SS Sutito, Vocal Point Jaringan Burung Migran Asian-Australasian Flyway di Indonesia, mengatakan, dengan status ini berarti TN Sembilang diakui internasional sebagai lokasi persinggahan. Secara tak langsung akan meningkatkan perlindungan dan pelestarian kawasan.

"Orang akan berpikir ulang

untuk alih fungsi lahan yang tepat merusak kawasan itu karena dikenali secara internasional. Selain itu, kemungkinan ada program dan dana internasional untuk perlindungannya," ujarnya.

Menurut Agus, perlindungan semua jalur migrasi amat penting. Kerusakan di satu titik persinggahan akan merusak semua jalur. Pencilannya adalah penyadaran publik agar tidak membunuh burung-burung migran itu. Perburuan masif pernah terjadi di Indramayu, Jawa Barat.

Terkait itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengingatkan, TN Sembilang juga punya kekayaan flora dan fauna. Salah satunya habitat harimau Sumatera yang terancam punah. (FRE)

Kebakaran Bisa Rusak Sumber Air

Umumnya akibat Kelalaian Manusia

BANJARNEGARA, KOMPAS — Penduduk di kaki dan lereng Gunung Petarangan, Jawa Tengah, khawatir, kebakaran hutan di gunung itu bakal merusak mata air yang menjadi andalan dalam kehidupan dan pertanian. Gundulnya hutan juga berpotensi menimbulkan longsor pada lereng bukit.

Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Ibrahim, menyatakan itu saat bersama ratusan warga, personel Perhutani, TNI, dan badan penanggulangan bencana daerah berupaya membuat *ilaran*, semacam parit untuk menjaga api tidak merambat ke pohon lain, Senin (27/8).

Kebakaran di hutan Gunung Petarangan, Kecamatan Batur, terjadi sejak Sabtu siang. Api berkobar di petak 21, 22, dan 23 Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tlagabang, Batur, dan Simbar. Api diduga rembetan da-

ri hutan wilayah KPH Pekalongan Timur di Kabupaten Batang.

Menurut Mantri Kehutanan Kecamatan Batur, Samsuri, hingga Senin, kobaran api sudah membakar semak, pohon pusa, bintang, dan rimba campur seluas lebih dari 40 hektar.

Menurut Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, saat meninjau upaya pemadaman, kebakaran hutan merupakan akibat kelalaian manusia.

Padang rumput dan semak-semak di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan areal hutan yang berdekatan dengan per-

mukiman penduduk di Kabupaten Boyolali rawan terbakar pada musim kemarau. Langkah antisipasi terus dilakukan, antara lain, patroli rutin dan imbauan kepada masyarakat. Demikian pernyataan Kepala Taman Nasional Gunung Merbabu Wisnu Wibowo.

Kerentanan juga terjadi di hutan di Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan, Jawa Timur.

Di Jakarta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat berdisiplin untuk menghindari kebakaran, baik di hutan maupun permukiman.

Ia memerintahkan petugas Perhutani (khusus di Jawa) dan petugas kehutanan untuk bersiaga dan waspada.

Untuk luar Jawa, tahun 2003 Kemhut membentuk Brigade Penanggulangan Kebakaran Hutan (Manggala Agni). Jumlahnya 5.000-an personel di 10 provinsi prioritas penanggulangan kebakaran. (GRE/UTI/BAY/DIA/ICH)

Kebakaran Hutan Meluas

Titik Api Terpantau Makin Banyak di Kalimantan

PURBALINGGA, KOMPAS — Kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, yang terjadi sejak Sabtu (25/8) dini hari terus meluas. Upaya pemadaman terkendala kondisi lingkungan yang kering dan embusan angin kencang. Namun, semua pendaki yang sempat terjebak dapat dievakuasi.

Pantauan Kompas hingga Minggu sore, kepulan asap putih terlihat di bagian timur gunung setinggi 3.428 meter dari permukaan laut (mdpl). Hal itu tampak dari pos pendakian Dusun Bambang, Desa Kutabawa, Karahgraja, Purbalingga. Titik api terlihat di jalur pendakian antara pos lima dan pos enam pada 2.500-2.600 mdpl di perbatasan Purbalingga-Pemalang.

Konandan tim Search and Rescue (SAR) Desa Kutabawa, Sugeng Riyadi, mengatakan, luas area hutan di lereng Gunung Sla-

met yang terbakar diperkirakan mencapai 40 hektar (ha). "Titik api di wilayah Pemalang sulit dipadamkan dan meluas menuju wilayah Purbalingga. Fokus kami mengevakuasi pendaki. Setelah dipastikan area gunung kosong, lebih mudah melokalisasi kobaran api," katanya.

Menurut Sugeng, saat kebakaran, tercatat sekitar 250 pendaki berada di area gunung. Evakuasi dilakukan dengan menerjunkan tim SAR. Bahkan, 40 pendaki terjebak di puncak karena jalan terhambat api. Mereka dievakuasi melalui jalur pendakian Guci, Teggal., Petugas SAR Koordinator Wilayah III Jawa Tengah, Rudi Setiawan, menyatakan, saat ini terpantau delapan titik api yang merambat ke bawah. Vegetasi yang terbakar berupa damar, pinus, serta pohon hutan lain.

Asisten Perhutani Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwana Gunung Slamet Timur Ahmad Efendi memaparkan, sekitar 300 personel Perhutani, SAR, dan warga dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membuat parti agar api tak meluas.

Penutupan Angga (23), pendaki asal Yogyakarta yang dievakuasi tim SAR, kebakaran diduga berasal dari sisa api unggun pendaki. "Mungkin api unggun yang ditinggalkan belum benar-benar mati," katanya. Beberapa pendaki lain sempat berusaha mematikan api, tetapi angin kencang menyulitkan pemadaman.

Dari catatan Kompas, kebakaran hutan di Gunung Slamet dalam lima tahun terakhir terjadi pada musim kemarau. Kebakaran pada Agustus 2011 merusak 5 ha hutan, pada September 2009 menghancurkan 52 ha hutan, sedangkan pada Agustus 2007 membakar 4 ha hutan.

Kebakaran di Kalimantan

Sementara itu, kabut asap mulai terasa di sekitar Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terutama pada pagi hari. Kabut baru berkurang setelah matahari naik cukup tinggi dan angin berembus kencang.

Haruman, Manajer Operasional Bandara Syamsudin Noor, Minggu, mengaku kondisi udara di sekitar bandara dalam beberapa hari terakhir tidak secerah hari-hari sebelumnya. Namun, sejauh ini, hal itu belum berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan. Jarak pandang masih di atas 5 kilometer.

Data titik api di Kalsel sejak Januari sampai Agustus 2012 pada Dinas Kehutanan Kalsel mencapai 253 titik. Adapun titik api di Kalimantan Tengah, menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng Mugeni, sampai Agustus 2012 mencapai lebih dari 500 titik. Daerah yang dianggap rawan antara lain Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Palangkaraya.

Administrator Pelabuhan Kumi, Kotawaringin Barat, Kalteng, Agus Subagio, mengatakan, kabut asap sejauh ini belum menimbulkan gangguan terhadap pelayaran. (GRE/WER/BAV)

LAHAN GAMBUT

Areal Rawa Tripa Diminta Dikembalikan

JAKARTA, KOMPAS – Lahan gambut seluas 1.605 hektar di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang diberikan untuk perluasan perkebunan sawit sebuah perusahaan didesak dimajukan kembali ke wilayah moratorium kehutanan. Pemerintah dan aparat hukum diminta serius mengusut kasus ini.

"Izin dari Gubernur Aceh diberikan saat areal itu masuk dalam peta moratorium. Ketika dipersoalkan, Kementerian Kehutanan segera menghapus areal itu dari peta moratorium. Analisis kami menunjukkan, penghapusan areal itu dari peta moratorium tidak beralasan karena hak guna usaha pada areal itu tidak jelas," kata Elhan Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics, Senin (16/4), di Jakarta.

Seperti diberitakan, kasus ini diajukan Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia (Wahli) Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Gubernur Aceh digugat karena pemberian izin itu. Pada sidang 3 April PTUN menolok gugatan Wahli Aceh.

Ditanya kasus ini di sela-sela *Journalist Class "Ekonomi Hijau"*, Senin, di Jakarta, Deputy Perencanaan dan Hubungan Internasional Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), Heru Prasetyo, mengatakan, dalam forum resmi beberapa waktu lalu, Badan Pertanahan Nasional menyatakan telah terbit hak guna usaha (HGU) untuk lahan Rawa Tripa. "Setelah kasus ditolak PTUN, kami kirim tim ke lapangan. BPN daerah mengatakan belum ada HGU" ujarnya.

Ia mengatakan, UKP4, yang juga ditugasi sebagai Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, tak

diam atas kasus ini. UKP4 meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Polri melakukan investigasi lanjutan. Jika terbukti melanggar perundangan, perlu diambil tindakan tegas dan tepat.

Melalui siaran pers, Ketua Satgas REDD+, Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan, Rawa Tripa merupakan habitat penting bagi satwa langka dilindungi, termasuk orangutan. Hasil investigasi menunjukkan ada kebakaran lahan di wilayah itu yang terkesan dilakukan terencana.

Tim juga menemukan 1.605 hektar lahan berada di Kawasan Ekosistem Leuser. Sebagian sudah ditanami kelapa sawit dan siap tanam serta sebagian lain masih berupa hutan. Temuan lain adalah areal berada di lahan gambut sedalam lebih dari tiga meter. (CH)

Kerusakan Hutan Terabaikan

Pemerintah Pusat dan Daerah Saling Tanggung Jawab

JAMBI, KOMPAS — Perusakan dan penghancuran taman nasional dan hutan lindung telah berlangsung lama serta terus meningkat setiap tahun, tetapi jarang ditindak. Penerbitan berlangsung sesaat dan tanpa sanksi tegas. Bahkan, pemerintah pusat dan daerah seperti saling lempar tanggung jawab dalam mengatasi persoalan itu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (19/4), menegaskan, kawasan taman nasional tetap dilarang dirambah. Karena itu, Kementerian Kehutanan akan terus menjalankan

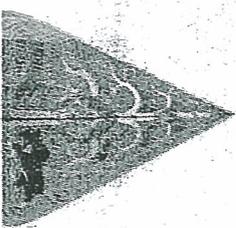
berbagai prosedur guna menerbitkan perubahan kawasan nasional yang dilindungi taman nasional yang dilindungi

(Bersambung ke hal 15 kol 1-5)
BACA JUGA HAL 22

SEJUMLAH ATURAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

- Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung
- Syarat penggunaan kawasan hutan:
 - a. Tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan (mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan).
 - b. Digunakan untuk kepentingan pembangunan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi, sarana transportasi (jalan sarana pengangkut hasil produksi), sarana dan prasarana sumber daya air, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, serta pembangunan sementar/korban bencana alam.
- Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dalam kawasan hutan produksi, penambangan dengan pola terbuka dan bawah tanah.
 - b. Dalam kawasan hutan lindung, hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Turunnya permukaan tanah.
 - Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen.
 - Terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Sumber: Disarikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.



GUNAWAN

Yerusakkan Hutan Terbaiki

ambungan dari halaman 1)

1. "Tidak ada yang boleh membah kawasan taman nasional. Kami mencari solusi baik agar kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan terjaga. Namun, para cikong yang emodali perambahan hutan saya sikat," ujar Menhut.

Di Indonesia ada 43 taman nasional darat dengan luas kawasan 12,3 juta hektar. Namun, 1 persen di antaranya dalam ndisi rusak parah akibat perambahan. Di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), misalnya, kini beroperasi 40 perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dijen Perindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemhutariori menambahkan, peneliti-pidana kehutanan di TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan rus berjalan. Namun, prinsip kerjanya tak menghiraukan perabah yang diperlat pemodal. Mengkal lain, pemerintah juga arelokasi 50 keluarga perambah hutan di Sumatera Utara ke mtera Selatan dalam program usmigrasi.

"Kami sudah menggelar operasi terpadu untuk menurunkan rambah dari TN Bukit Barisan latan dan TN Gunung Leuser.

Di TN Kerinci Seblat juga mulai ditherbitkan. Perambah diperingatkan keluar dari hutan. Tetapi kalau sudah berskala masif, tetap dipidana," ujar Darori.

Soal dana dan kewalahan

Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jambi Hasriah menyayangkan tuntutan pemerintah pusat kepada daerah untuk menjaga taman nasional begitu besar, tetapi tak sebanding dengan alokasi dana bagi dinas kehutanan di daerah.

Pihaknya mengaku kewalahan menjaga kawasan hutan produksi dan konservasi di Jambi seluas 2,1 juta hektar (ha) dengan hanya sebesar Rp 350 juta dan dukungan sekitar 100 polisi hutan yang memasuki usia pensiun.

"Menjaga hutan produksi yang penuh konflik dengan perambah saja kami sudah kewalahan, masih ditambah lagi beban menjaga taman nasional. Tuntutan ini tak sebanding dengan yang pusat berikan kepada kami," ujarnya.

Hasriah menambahkan, dana pusat bagi lembaga bentukkan pusat, yakni Balai Taman Nasional, sekitar Rp 5 miliar per tahun. "Namun, dana untuk menjaga taman nasional melalui dinas kehutanan tak ada," katanya.

Senada dengan Hasriah, Gu-

bernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan akan meminta pemerintah pusat membantu penanganan perambahan hutan. Selain aktivitas perambahan lahan belum terselesaikan, perambahan baru juga terjadi di sejumlah lokasi. "Kami kewalahan. Makin banyak perambah yang masuk ke kawasan hutan lindung dan taman nasional," katanya.

Bahkan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkipli Yusuf berpendapat, pihaknya tak berperan dalam mengawasi taman nasional karena Kemhut telah membentuk unit pelaksana teknis di Riau, yakni Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang bertugas mengawasi hutan konservasi.

"Kawasan konservasi sepenuhnya wewenang pusat. Sesuai aturan, tugas kami hanya menjaga hutan produksi yang berada minimal di dua kabupaten/kota yang belum diselesaikan pengelolannya kepada perusahaan," ujarnya. Kersakan di TNTN sekitar 28.500 hektar.

Di KEL, Aceh, kersakan terparah dipicu alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pertanian, pembangunan liar, dan pembangunan jalan. Saat ini, selain 40 perusahaan pertambangan, ada pula 16 perusahaan perkebunan beroperasi dalam KEL.

"Semestinya kawasan KEL tak dipertuntukkan bagi permukiman dan infrastruktur, apalagi perkebunan dan pertambangan. Ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang menetapkan KEL sebagai kawasan strategis nasional," kata Kepala Bidang Pemanfaatan Lingkungan KEL Teddy Azima. KEL seluas 2,7 juta ha meliputi 2,2 juta ha di Aceh dan 500.000 ha di Sumut.

Tumpang tindih

Tingginya tingkat perambahan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung, tidak lepas dari tumpang tindihnya aturan soal tapal batas wilayah. Karena itu, Polres Tanggamus sedang menelusuri indikasi terjadinya pungutan liar terhadap perambah di wilayah Pematangsawa.

Di Pematangsawa, sebagian perambah menguasai tanah yang masuk kawasan TNBBS dengan membeli dari oknum pejabat desa (Kepala *pekon*) setempat. "Ada yang beli Rp 2 juta-Rp 3 juta per ha. Mereka dimingi sertifikat. Kami telah menangkap salah seorang dari mereka yang ternyata suami kepala *pekon* di Tiron," ujar Kepala Polres Tanggamus Ajun Komisar Besar Bayu Aji. Ada pula pungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap obyek

tanah yang dikuasai perambah, seperti di Rata Agung dan Lemong, Kabupaten Lampung Barat. "Kami menisyalir pajak ini muncul akibat ketidakpahaman dan kurangnya koordinasi aparat desa," ujar Kepala Bidang Wilayah I TNBBS Iwen Yuvanh.

Terkait penertiban, Kepala Balai Besar TN Gunung Leuser Andi Basrul mengatakan akan menempuh langkah represif untuk mengusir perambah. Ia akan meminta bantuan TNI dan Polri serta mengajak masyarakat yang peduli kelestarian hutan untuk mengusir perambah.

Juni 2011, petugas TNGL dibantu polisi coba mengusir perambah. Aksi itu dilawan dan sempat ricuh sehingga 11 orang, termasuk polisi, terluka dan dirawat di rumah sakit. "Butuh waktu lama dan kesabaran tinggi. Namun, ini yang bisa kami lakukan," kata Kepala Bidang Teknis Konservasi BB TNGL Gennan S Hasibuan.

Hingga kini, 22.100 ha TNGL di Sumut dirambah. Sekitar 15.000 ha di antaranya dijadikan permukiman dan perkebunan kelapa sawit dan karet. Adapun jumlah perambah 6.000 jiwa. Mereka tersebar di Sei Miyak, Bara Indah, dan Damar Hitam.

(ITA/JON/MHF/ADH/SAH/HAN/HAN)

2
MORATORIUM KEHUTANAN
Perubahan Kedua Berpotensi Terjadi Lagi

Jakarta, KompasCetak 20/02/12 - Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan masih berpotensi untuk direvisi kedua kali. Ini karena masih ada masukan data susulan untuk menyempurnakan peta itu.

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) pertama dikeluarkan Kementerian Kehutanan pada 17 Juni 2011 untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Hutan Gambut yang terbit 20 Mei 2011. Peta ini memadukan data dari Bappenas/Wetland yang menggunakan dasar peta 1:1 juta dan data Kementerian Kehutanan menggunakan peta 1:250.000.

Kementerian Kehutanan pada 20 November 2011 merevisi PIPIB dengan mengakomodasi berbagai data. "Pada tahapan ini terjadi pengurangan areal hutan yang dimoratorium karena dilakukan cek lapangan dan data dari berbagai studi," kata Nirarta Samadhi, Ketua Kelompok Kerja Monitoring Moratorium Satuan Tugas Kelembagaan REDD+, Jumat (17/2), di Jakarta.

Peta revisi pertama ini mengakomodasi data sebagian besar kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi. Nirarta mengatakan, pada revisi kedua peta akan memasukkan kekurangan data dari enam kantor BPN provinsi lain.

"Revisi juga bisa dilakukan dari pengaduan masyarakat dan LSM. Selain itu, kami melakukan pengecekan di lapangan setelah melihat peta hutan yang dimoratorium, tetapi menunjukkan kecurigaan," katanya. Revisi PIPIB, seperti diatur dalam Inpres Moratorium, dilakukan setiap enam bulan sekali.

Di sisi lain, Greenomics Indonesia menilai, revisi PIPIB terkesan mudah mengeluarkan areal moratorium. Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, mencontohkan, lebih dari 400.000 hektar areal moratorium dilepas untuk klaster Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Lahan gambut merupakan areal dominan yang dikeluarkan dari peta moratorium hasil revisi pertama yang diterbitkan 22 November 2011.

Ia menyebutkan, hasil analisis overlay peta 17 Juni 2011 dengan 22 November 2011 menunjukkan, lahan gambut 350.000 hektar yang sebelumnya ditetapkan sebagai areal moratorium dilepas untuk tiga klaster MIFEE. Greenomics meminta Satuan Tugas Kelembagaan REDD+ mengkaji ulang pelepasan areal moratorium untuk MIFEE. (ICH)

Perlu Perketat Pengawasan Hutan
Jumat, 20 April 2012

Padang, Kompas - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Nasrul Abit, meminta pengelola kawasan Tanam Nasional Kerinci Seblat supaya memperketat pengawasan. Upaya tersebut untuk menekan pembalakan liar yang terus terjadi di kawasan TNKS.

Nasrul Abit yang dihubungi, Kamis (19/4), menjelaskan, dari 212.000 hektar lahan Tanam Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang masuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sekitar 25 persen di antaranya dalam kondisi rusak akibat penebangan liar. "Saya setuju jika dilakukan penanaman kembali, tetapi jangan menanam saja, perlu juga melakukan pengawasan secara ketat," katanya.

Dia mengakui Pemkab Pesisir Selatan tidak sanggup melakukan pengawasan itu secara mandiri mengingat wilayah yang terentang demikian luasnya. "Hari ini saja saya baru mendapat informasi bahwa besok akan ada empat buah mobil membawa kayu ke Kerinci," katanya.

Ia menambahkan, untuk mengurangi aktivitas pembalakan liar, pihaknya membatalkan berlakunya surat keterangan asal usul (SKAU) kayu. "Mulai bulan kemarin tidak ada lagi camat yang bisa mengeluarkan SKAU. Dengan demikian, pada saat ini semua kayu yang keluar dari Pesisir Selatan adalah kayu ilegal," ujar Nasrul.

Menurut dia, dari total kawasan hutan seluas 579.000 hektar, sekitar 50.000 hektar di antaranya berada dalam kondisi kritis. Dari luasan itu, 68 persen merupakan kawasan hutan suaka, hutan lindung, dan taman nasional.

Picu abrasi

Pembalakan hutan untuk pembangunan permukiman masyarakat pesisir Pantai Timur Jambi memicu abrasi di Taman Nasional Berbak (TNB). Hingga kini, abrasi terjadi melalui garis pantai sepanjang 20 km dengan gerusan dari bibir pantai hingga sejauh 1 km ke arah kawasan TNB.

Kabag Usaha Balai TNB, Nukman, mengemukakan, gerusan abrasi terjadi setelah hutan bakau sepanjang tepi pantai terus ditebangi. Warga sekitar taman memanfaatkan kayu bakau untuk tonggak-tonggak rumah atau diolah menjadi arang.

Dari Palembang dilaporkan, pengelola Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan berupaya menghidupkan wisata minat khusus di permukiman penduduk yang saat ini berada dalam kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Guna mengurangi potensi konflik, daerah permukiman seluas 2.900,92 hektar itu juga tengah diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional Sembilang.

Kawasan yang tengah dirintis sebagai wisata minat khusus meliputi Dusun Sembilang, Terusan, serta kelompok rumah ikan (bagan) laut maupun sungai di sekitarnya. (INK/ITA/IRE)

Kasus Rawa Tripa Mulai Diselidik

Banda Aceh, Kompas C'EtAK.03 05 12 - Pemerintah pusat mengunjungi hutan gambut Rawa Tripa, Aceh, Rabu (2/5). Tim Kementerian Lingkungan Hidup, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dan praktik perusakan lingkungan di sana.

Tim bekerja sama mengumpulkan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran operasional perusahaan sawit di area hutan gambut di barat daya Aceh tersebut. Setiba di Banda Aceh, tim gabungan mengadakan rapat tertutup di Kepolisian Daerah Aceh. Keesokan harinya menuju Rawa Tripa menempuh perjalanan darat sekitar enam jam.

Pengumpulan bahan keterangan kami ini dengan dugaan sedikitnya ada lima pelanggaran, kata Deputy V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sudariyono, kemarin.

Menurut dia, dugaan pertama adalah indikasi pembukaan lahan gambut baru seluas 1.605 hektar tanpa izin. Saat ini, dari sekitar 61.000 hektar gambut, diperkirakan separuh lebih atau 35.000 hektar beralih dari hutan gambut menjadi perkebunan sawit.

Dugaan adanya pelanggaran kedua, yakni adanya berbagai kegiatan yang masuk kawasan ekosistem Leuser. Kegiatan itu merusak kawasan yang seharusnya dikonservasi.

Adapun dugaan pelanggaran ketiga, adanya pembakaran untuk pembukaan lahan gambut. Dugaan pelanggaran keempat, kegiatan pengolahan sawit menghasilkan limbah pencemaran lingkungan yang jelas berisiko bagi manusia.

Dugaan pelanggaran yang kelima, kegiatan di atas lahan gambut yang memiliki batas kedalaman lebih dari tiga meter. Itu melanggar ketentuan, kata Sudariyono.

Sementara itu, jaksa A Kadir dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung mengatakan, tuntutan atas kerugian negara yang disebabkan aktivitas perkebunan sawit di hutan gambut Rawa Tripa akan dijalankan, baik secara pidana maupun perdata.

Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah cukup mewakili pemerintah dalam menjalankan tuntutan secara pidana ataupun perdata, kata Kadir.

Pembukaan lahan gambut Rawa Tripa mengejutkan banyak kalangan. Selama ini pemerintah Provinsi Aceh dikenal berkomitmen menjaga hutan dari alih fungsi. (NAW)

Greenpeace Laporkan Dugaan Perusakan Hutan
Sabtu, 3 Maret 2012

Jakarta, Kompas - Greenpeace Indonesia dan Walhi menyampaikan hasil investigasi dugaan perusakan hutan di Riau kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI. Perusakan hutan yang menghancurkan pohon ramin itu diduga dilakukan perusahaan kertas.

Demikian disampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Zulfahmi di Badan Reserse Kriminal Polri, di Jakarta, Jumat (2/3). "Kami menyampaikan hasil laporan investigasi satu tahun ke Mabes Polri," katanya.

Sesuai dengan Konvensi Internasional Perdagangan Spesies Terancam Punah (CITES), kayu ramin masuk pengawasan ketat. Catatan Greenpeace Indonesia, berdasarkan analisis peta, sejak penebangan ramin dilarang tahun 2001, paling tidak 180.000 hektar hutan lahan gambut di Sumatera hancur di konsesi-konsesi perusahaan. Lahan gambut adalah habitat penting ramin dan habitat satwa seperti harimau yang tersisa sekitar 400 ekor di alam bebas.

Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia Rahma Shofiana menambahkan, sepanjang 2011, investigasi dilakukan berkali-kali di Perawang, Riau. Di sana diidentifikasi kayu ramin bercampur kayu alam lain untuk bahan baku pabrik kertas.

Investigator mengirimkan sampel 46 gelondong kayu kepada lembaga uji laboratorium independen di luar negeri. Hasilnya, kayu-kayu itu merupakan kayu ramin. "Diduga diperoleh dari perusakan hutan," kata Rahma. (FER)

Pilkada Jadi Ajang Obral Perizinan

Rabu, 18 April 2012

HUTAN SUMATERA

Pilkada Jadi Ajang Obral Perizinan

Bengkulu, Kompas – Pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan umum selalu menjadi ajang mengobral pemberian izin usaha pertambangan dan perkebunan bagi calon kepala daerah di Pulau Sumatera. Bahkan, berbagai urusan administrasi yang semula sulit bagi perambah hutan mendadak dipermudah demi kepentingan politik.

Demikian hasil penelitian sejumlah ahli kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat yang diperoleh Kompas, Selasa (17/4). "Saya pernah menyaksikan salah seorang calon kepala daerah dalam debat kandidat menyilakan publik untuk menggarap hutan. Alasannya, hutan yang ada milik bersama," kata pengajar di Universitas Bengkulu, Gunggung Senoaji.

Hal serupa dibenarkan Agus Susatya, pakar kehutanan dari Universitas Bengkulu. "Salah satu modus yang digunakan adalah dengan mengalihfungsikan atau menurunkan status hutan. Akan tetapi, proses ini panjang dan berisiko secara hukum," ujarnya.

Berdasarkan hasil penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu pada 2009-2010, saat pemilu dan pilkada Provinsi Bengkulu digelar, diterbitkan izin usaha pertambangan dan perkebunan bagi 42 perusahaan. Izin-izin itu mengakibatkan perusahaan menguasai lahan 75.703 hektar.

"Pilkada dan pemilu berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Bengkulu. Saat itu, kepala daerah cenderung memberikan izin tambang dan perkebunan kepada investor guna mendapatkan dana segar untuk biaya politik selama pilkada dan pemilu," kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi, Selasa, di Bengkulu.

Kini, ruang kelola pemodal melalui kuasa pertambangan dan perkebunan di Bengkulu mencapai 463.964 hektar atau 25 persen dari luas wilayah Bengkulu. Itu terbagi dalam pertambangan pasir (156.112 hektar), batubara (99.305 hektar), dan perkebunan (208.546 hektar).

Janji kampanye

Kasus serupa terjadi di Riau. Momentum pilkada menjadi masa indah bagi perambah hutan. "Menjelang pilkada, surat-menyurat, terutama bukti diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanah (SKT) akan lebih mudah diterbitkan. Namun, imbalannya, perambah diminta memilih calon tertentu. Dengan memiliki KTP dan SKT, keberadaan perambah semakin kuat. Itu pola umum yang terjadi di Riau," ujar Zazali Ahmad, Direktur Scale Up, lembaga mediasi konflik di Pekanbaru.

Dia mencontohkan, dari ribuan keluarga perambah di 14 desa yang menduduki 28.500 hektar di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Riau, hampir semua memiliki KTP. Mereka terdaftar sebagai penduduk yang memiliki hak pilih saat pilkada beberapa waktu lalu.

Saat kampanye, calon kepala daerah berjanji, jika terpilih, dia akan memperjuangkan lahan yang disengketakan dilepas dari kawasan hutan negara. "Jualan politik seperti itu jelas mendapat perhatian khusus dari perambah," kata Zazali.

Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara Jimmy Panjaitan juga mengakui ada gejala maraknya penerbitan izin pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM) oleh bupati setelah terpilih. Izin itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menyokong dirinya dalam pilkada. "Kami melihat fenomena ini terjadi di Sumut. Mau tidak mau ini memengaruhi deforestasi," ujar Jimmy.

Pakar kehutanan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, San Afri Awang, menemukan praktik serupa. "Penyalahgunaan wewenang perizinan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan banyak dilakukan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur. Mereka menerbitkan izin tanpa sepengetahuan Menteri Kehutanan," katanya.

Namun, Kepala Dinas Kehutanan Sumut JB Siringoringo menampik anggapan ada hubungan antara kerusakan hutan dan pilkada. "Kerusakan itu lebih pada tumpang tindih izin yang dikeluarkan di wilayah hutan, bukan terkait pilkada," ujarnya.

Pemprov Bengkulu akhirnya mencabut izin usaha pertambangan batubara PT Inmas Abadi di sekitar kawasan konservasi Pusat Latihan Gajah Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara. Jika tidak, dikhawatirkan usaha pertambangan batubara akan mengancam keberadaan satwa liar, terutama gajah sumatera.

"SK pembatalan sudah saya tanda tangani sekitar Januari. Arsip SK saya pegang. Semula izin diberikan karena investor berjanji membangun pelabuhan. Janji itu tak terpenuhi," ujar Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah.

(ADH/SAH/WSI/ABK)

GAMBUT

Riset dan Standar Deforestasi Selamatkan Lahan

Rabu, 13 Juni 2012

Jakarta, Kompas - Untuk menyelamatkan lahan dan hutan gambut, mendesak dilakukan riset dan penetapan standar deforestasi. Sejauh belum diketahui secara ilmiah, lahan dan hutan gambut semestinya tidak diubah fungsi dan peruntukannya.

"Penetapan reduksi emisi dari sektor kehutanan dan gambut sebesar 87 persen setara 0,672 gigaton karbon dioksida ekuivalen. Tetapi, kegiatan riset gambut serta penetapan standar deforestasi tak berjalan baik," kata Ketua Perhimpunan Gambut Indonesia Bambang Setiadi, Selasa (12/6), di Jakarta.

Bambang mengikuti konvensi gambut sedunia di Stockholm, Swedia, 4-8 Juni 2012. Dalam pertemuan internasional itu, Bambang menekankan pentingnya penetapan standar deforestasi di dunia. "Tanpa ada standar deforestasi, luas hutan akan terus menyusut," kata Bambang.

Ia merujuk periode tahun 1995-2005 Indonesia kehilangan 28,1 juta hektar. Ini yang terbesar kedua setelah Brasil yang kehilangan 42,3 juta hektar.

"Indonesia dengan gambut tropika terluas di dunia masih dengan mudah mengubah fungsi dan peruntukan lahan gambut," kata Bambang.

Proyek pembukaan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah yang berakibat rusaknya ekosistem dan kebakaran pada tahun 1997 memberikan pengalaman berharga. Bambang mengatakan, pemotongan gambut untuk kanal 112 kilometer yang menghubungkan sungai Kapuas dan Sebangau berdampak fatal.

Saat itu, kanal yang ditujukan untuk mengaliri lahan dengan air Sungai Kapuas dan Sebangau menyurutkan air gambut dan berdampak pada kebakaran gambut.

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo mengatakan, kepentingan ekonomi, seperti peruntukan perkebunan sawit, kerap mengalahkan konservasi gambut. Pengusaha sawit pada periode tertentu memang memperoleh keuntungan, tetapi pada saat tertentu mendapat ancaman serius.

"Lahan gambut untuk sawit di musim kemarau panjang terancam kebakaran lebih besar," kata Bambang. (NAW)

KERUSAKAN HUTAN

Masyarakat Penyangga Tidak Pernah Dilibatkan

- Sabtu, 21 April 2012 |

Bengkulu, Kompas - Maraknya perusakan serta penghancuran hutan lindung, hutan produksi, dan taman nasional tidak terlepas dari pengabaian pemerintah terhadap masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan. Mereka yang tinggal di penyangga hutan diminta menjaga tanpa disertai pemberian kesempatan menjadi bagian dari pengelolaan kawasan tersebut.

"Akibatnya, masyarakat penyangga cenderung mengambil manfaat ekonomi dari hutan. Kesadaran mereka akan pentingnya kelestarian dan keberlanjutan hutan tak pernah dibangun. Saat ada pemodal datang menggoda dengan memberikan sejumlah uang untuk melakukan perambahan, mereka langsung mengikutinya," kata ahli ekologi tropis Universitas Bengkulu, Dr Yansen, di Bengkulu, Jumat (20/4).

Perusakan dan penghancuran hutan terus meningkat setiap tahun, tetapi jarang ditindak. Dari 12,3 juta hektar (ha) kawasan taman nasional darat di Indonesia, sekitar 30 persen di antaranya hancur akibat perambahan. Pemerintah pusat dan daerah masih saling lempar tanggung jawab mengatasi persoalan itu.

Dampak perusakan hutan kian nyata diderita masyarakat di Provinsi Aceh. Selama empat tahun terakhir, kejadian banjir terus meningkat, yaitu 46 kali pada 2007, 170 kali pada 2008, 213 kali pada 2009, dan 250 kali pada 2010. Longsor pun demikian, yaitu 12 kejadian pada 2007, 37 kejadian pada 2008, 56 kejadian pada 2009, dan 47 kejadian pada 2010.

Ancaman kehancuran mengintai 112.000 ha Taman Hutan Rakyat Sultan Adam di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, akibat diserbu ribuan penambangan emas ilegal oleh rakyat. "Saya minta tambang emas ilegal ditangani serius. Jika perlu, dilakukan operasi penertiban secara berkala setiap bulan agar aktivitas ilegal itu berhenti," kata Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin.

Di Kalimantan Barat, dari 9,1 juta ha hutan yang ada, sekitar 2,3 juta ha di antaranya segera diputihkan. Lahan ini bakal menjadi perkebunan kelapa sawit, seperti 200.000 ha di Kabupaten Ketapang dan 28.000 ha di Bengkayang. "Di kedua tempat tersebut tidak ada izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan, tetapi hutan sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit," kata pengamat kehutanan di Kalimantan Barat, Soenarno.

(ADH/HAN/WER/AHA/BAY)

Protokol Pengisian Lembar Koding

Pengantar

Analisis isi dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas berita lingkungan yang terdapat pada harian Kompas pada periode Februari- September 2012. Melihat apakah Objektivitas Kompas dikategorikan baik atau sebaliknya pada berita lingkungan dari tiga dimensi yaitu akurasi, ketidakberpihakan dan validitas. Bacalah dengan saksama petunjuk pengisian ini yang menjadi dasar bagi anda dalam mengisi lembar koding.

Berita Lingkungan

Penelitian ini hanya menyertakan berita lingkungan yang terdapat pada surat kabar harian Kompas. Berita disini dimaksudkan sebagai semua produk berita mengenai lingkungan yang dimuat oleh harian Kompas pada periode Februari- September 2012 yang tersebar pada halaman utama, rubrik Lingkungan dan Kesehatan dan rubrik Nusantara.

Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Penelitian ini hanya menyertakan berita mengenai lingkungan, lebih spesifik pada kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia selama periode yang telah ditentukan.

Prosedur

Bacalah berita dari surat kabar dengan teliti. Bacalah juga petunjuk pengisian ini agar anda dapat menempatkan berita dalam kategori yang tepat. Setelah itu isilah lembar koding dengan pilihan yang tepat.

1. Akurasi Berita

1.1. Kesesuaian Judul dengan Isi Berita

Kesesuaian judul yang dimaksudkan disini adalah judul utama yang terdapat di berita harus merupakan intisari atau garis besar dari sebuah berita, judul harus bisa menjelaskan persoalan yang terjadi dalam sebuah berita. Kesesuaian judul merupakan hal penting yang harus diukur dalam akurasi. Dengan demikian ada 2 kategori yaitu

- a. Sesuai, jika judul merupakan suatu kesatuan yang sama dengan isi berita atau merupakan kutipan yang terdapat dalam isi berita.
- b. Tidak sesuai, jika judul bukan merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau bukan merupakan kutipan yang terdapat dalam isi berita.
Misalnya: Berita dengan judul *Rawa Tripa Kembali Dimoratorium* merupakan judul yang sesuai dengan isi berita karena isi berita menggambarkan dan menjelaskan tentang lahan gambut **Rawa Tripa** yang kembali **dimoratorium** oleh pemerintah. Intercoder memilih a jika judul merupakan kesatuan atau kutipan dalam berita dan memilih b jika tidak.

1.2. Pencantuman waktu

Pencantuman waktu bertujuan untuk menunjukkan keakurasian dari fakta atau opini. Pencantuman waktu yang dimaksudkan disini adalah waktu pasti mengenai kejadian atau waktu wawancara. Dalam pencantuman waktu terdapat 2 kategori yaitu:

- a. Mencantumkan waktu, jika terdapat pencantuman tanggal, kata-kata tentang waktu atau menampilkan keduanya yaitu pencantuman tanggal dan kata-kata atau pernyataan tentang waktu yang jelas mengenai kejadian yang telah terjadi atau waktu wawancara.
- b. Tidak mencantumkan waktu, jika tidak terdapat pencantuman waktu yang jelas atau tidak terdapat pencantuman tanggal atau pernyataan tentang waktu.

Misalnya: memilih a jika terdapat penggalan kalimat seperti “*Hasil sementara penyelidikan menunjukkan, PT SPS 2 diduga membakar lahan 1,183 hektar, 19 Maret dan 24 Maret 2012*”. dan memilih b jika tidak terdapat penggalan kalimat seperti itu.

1.3. Penggunaan Data Pendukung

Untuk memperjelas pemberitaan mengenai sebuah masalah perlu adanya data pendukung. Data pendukung dalam sebuah berita bertujuan untuk meyakinkan atau memperjelas kebenaran dari berita tersebut, sehingga penggunaan data memcerminkan akurasi dari sebuah berita. Terdapat 2 kategori yaitu:

- a. Ada data pendukung, jika berita tersebut dilengkapi salah satu data pendukung seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, buku, undang-undang dan lainnya.
- b. Tidak ada data pendukung, jika berita tersebut tidak dilengkapi data pendukung seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi, gambar, buku, undang-undang dan lainnya.

Misalnya: memilih a jika terdapat data pendukung seperti pencantuman **UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** dalam berita dan memilih b jika tidak.

1.4. Faktualitas Berita

Faktualitas berita yang dimaksudkan disini adalah menyangkut ada atau tidaknya pencampuran fakta dengan opini dari wartawan yang menulis berita. Kata-kata yang mengandung opini wartawan seperti **tampaknya**, **seakan-akan**, **diperkirakan**, **terkesan**, **kesannya**, **seolah**, **agaknya**, **diramalkan**, **mengejutkan**, **kontroversi**, **maneuver**, **sayangnya** dan kata-kata yang menunjukkan oponitative lainnya. Terdapat 2 kategori yaitu:

- a. Ada pencampuran fakta dan opini apabila terdapat kata-kata opini
- b. Tidak ada pencampuran fakta dan opini jika tidak terdapat kata-kata opini.

Misalnya: memilih a jika terdapat penggalan kalimat opiniatif oleh wartawan seperti “ *ini sudah tidak rasional, anehnya pemerintah daerah tidak serius mengurangi luas kawasan tambang*” dan memilih b jika tidak.

2. Ketidakberpihakan

Yang dimaksudkan dengan ketidakberpihakan dalam pemberitaan yaitu menyangkut keseimbangan penulisan berita. Sebuah berita menjadi tidak berpihak ketika tidak terdapat keseimbangan baik dari sumber berita maupun ukuran fisik kolom. Ketidakberpihakan yang dimaksudkan memiliki pengertian berlaku adil atau tidak memihak ke mana-mana kecuali kebenaran yang ditemukan di lapangan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap berita tersebut untuk menjelaskan kejadian atau permasalahan. Selain itu dituntut pula untuk memberikan luas kolom yang sama bagi masing-masing pihak.

2.1. Ketidakberpihakan dilihat dari sumber berita yang digunakan

- a. Seimbang jika pemberitaan bersumber dari semua pihak yang terlibat dalam berita atau permasalahan tersebut
- b. Tidak seimbang jika pemberitaan hanya bersumber dari narasumber tunggal

Misalnya: berita dengan judul *Gambut tergradasi hingga 50 Persen* merupakan berita yang dikategorikan seimbang dari segi sumber berita karena narasumber yang terdapat dalam berita bukan merupakan narasumber tunggal, intercoder memilih a jika seimbang dan memilih b jika tidak seimbang

2.2. Ketidakberpihakan dilihat dari ukuran fisik luas kolom (centimeters kolom)

- a. Seimbang jika luas kolom pemberitaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan memiliki jumlah kesamaan
- b. Tidak seimbang, jika luas kolom yang dipakai antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan tidak memiliki jumlah kesamaan

Misalnya: berita dengan judul Gambut Tergredasi Hingga 50 Persen tidak seimbang jika dilihat dari luas kolom pemberitaan ini terlihat dari porsi pemberitaan antara dua narasumber yang terdapat dalam berita berbeda jauh dari segi *centimeters* kolom.

3. Validitas

Yang dimaksudkan dengan validitas adalah keabsahan dari pemberitaan. Hal ini dapat diukur dari atribusi yaitu pencantuman sumber berita secara jelas dan kompetensi yaitu menyangkut pihak yang dijadikan sumber berita dalam pemberitaan.

3.1. Atribusi yaitu pencantuman sumber berita secara jelas baik identitas maupun upaya konfirmasi, terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Sumber berita jelas, jika dalam berita dicantumkan identitas sumber berita secara jelas.
- b. Sumber berita tidak jelas, jika dalam berita tidak dicantumkan identitas secara jelas.

Misalnya: memilih a jika Sumber berita jelas seperti terdapat penggalan kalimat seperti ini “***Demikian dikatakan Merah Johanson dari Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur***”.

3.2. Kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita, apakah berita tersebut diperoleh atau berasal dari apa yang dilihat wartawan sendiri atau dari sumber berita yang menguasai persoalan atau hanya sekedar kedekatannya dengan media yang bersangkutan atau karena jabatannya.

Kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita dalam mendapatkan informasi digunakan untuk mengetahui validitas kronologi suatu peristiwa. Ada 3 kategori, yaitu:

- a. Wartawan bila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil pengamatan wartawan sendiri secara langsung yaitu mengungkap informasi secara langsung yaitu mengungkap informasi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh wartawan itu sendiri.
- b. Pelaku langsung, jika peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara wartawan dengan sumber berita yang mengalami langsung peristiwa tersebut misalnya seperti saksi mata, korban atau orang yang terlibat atau berhubungan langsung dengan peristiwa itu sendiri atau berada di lokasi saat peristiwa terjadi.
- c. Bukan pelaku langsung, jika peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara wartawan dengan sumber berita yang tidak mengalami secara langsung atau terlibat langsung dengan sebuah peristiwa yang diberitakan, hanya karena jabatan atau akses informasi sehingga dijadikan sumber berita.

Berita dikatakan valid ketika berita didasarkan pada hasil wawancara wartawan dengan pelaku langsung atau berdasarkan pengamatan wartawan namun terlebih dahulu melakukan cek dan recek di lapangan. Berita dikatakan tidak valid ketika berita hanya didasarkan pada hasil wawancara dengan pelaku tidak langsung atau hanya berdasarkan pengamatan wartawan tanpa melakukan cek dan recek dengan pelaku langsung dan pendapat dari pelaku tidak langsung.



Lembar Koding Analisis isi Objektivitas Berita Lingkungan Kompas dalam Pemberitaan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia, periode Februari-September 2012

Media : Kompas

Intercoder :

Judul Berita :

Hari/ tanggal :

Pada bagian ini Anda diminta memberikan tanda cek (✓) sebagai respon dari jawaban yang anda pilih pada pilihan yang telah disediakan. Berikan satu jawaban disetiap pertanyaan.

1. OBJEKTIVITAS DIUKUR BERDASARKAN DIMENSI AKURASI

No.		Akurasi
1.	Kesesuaian judul dengan isi berita	Sesuai Tidak Sesuai
2.	Pencantuman waktu	Dicantumkan Tidak dicantumkan
3.	Penggunaan data pendukung	Ada Tidak ada
4.	Faktualitas berita	Ada pencampuran fakta dan opini Tidak ada pencampuran fakta dan opini

2. OBJEKTIVITAS BERITA DIUKUR BERDASARKAN DIMENSI KETIDAKBERPIHAKAN

No. Ketidakberpihakan

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Ditinjau dari sumber berita | Seimbang |
| | | Tidak seimbang |
| 2 | Ukuran fisik kolom luas (<i>centimeters</i>) | Seimbang |
| | | Tidak seimbang |

3. OBJEKTIVITAS BERITA DIUKUR BERDASARKAN DIMENSI VALIDITAS

No Validitas

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Atribusi atau pencantuman sumber berita secara jelas | Sumber berita jelas |
| | | Sumber berita tidak jelas |
| 2 | Kompetensi | Wartawan |
| | | Pelaku langsung |

Pelaku tidak langsung

Yogyakarta,

(Intercoder)



CONTOH PERHITUNGAN

Kategori Akurasi

1. Kesesuaian isi dengan judul berita :

No	Peneliti	Intercoder I	Intercoder II
1	A	A	A
2	A	A	B
3	A	A	A
4	A	A	A
5	A	A	A
6	A	A	A
7	A	A	A
8	A	A	A
9	A	A	A
10	A	A	A
11	A	A	A
12	A	A	B
13	A	A	A
14	A	A	A
15	A	A	A
16	A	A	A
17	A	A	A
18	A	A	A
19	A	A	A
20	A	A	A
21	B	A	B
22	A	A	A
23	A	A	A
24	A	A	A
25	A	A	A
26	A	A	A
27	A	A	A
28	A	A	A
29	A	A	A
30	A	A	A
31	A	A	A
32	A	A	A
33	A	A	A
34	A	A	A
35	A	A	A
36	A	A	A
37	A	A	A
38	A	A	A
39	A	A	A
40	A	A	A

41	A	A	A
42	A	A	A
43	A	A	A
44	A	A	A
45	A	A	A
46	A	A	A
47	A	A	A
48	A	A	A
49	A	A	A
50	A	A	A
51	A	A	A
52	A	A	A
53	A	A	A
54	A	A	A
55	A	A	A
56	A	A	A
57	B	B	A
58	A	A	A
59	A	A	A
60	A	A	A
61	B	B	A
62	A	A	A
63	A	A	A
Kesesuain		62	61

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan uji reliabilitas (CR) pengkoding 1} &= \frac{2.M}{N_1+N_2} \\ &= \frac{2.62}{63+63} = 0,98 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CR pengkoding 2} &= \frac{2.M}{N_1+N_2} \\ &= \frac{2.61}{63+63} = 0,96 \end{aligned}$$

Perhitungan analisis (peneliti) :

- A (sesuai) $= \frac{60}{63} \times 100\% = 95,2\%$
- B (tidak sesuai) $= \frac{3}{63} \times 100\% = 4,8\%$

Kategori Ketidakberpihakan

Ditinjau dari Sumber Berita

No	Peneliti	Intercoder I	Intercoder II
1	A	A	A
2	A	A	A
3	A	A	A
4	A	A	A
5	A	A	A
6	B	B	A
7	A	A	A
8	A	A	A
9	A	A	A
10	A	A	A
11	A	A	A
12	A	A	A
13	A	A	A
14	A	A	A
15	A	A	A
16	A	A	A
17	A	A	A
18	A	A	A
19	A	A	A
20	A	A	A
21	A	B	B
22	A	A	A
23	A	A	A
24	A	A	A
25	A	A	A
26	A	A	A
27	A	A	A
28	A	A	A
29	A	B	A
30	A	A	A
31	A	A	A
32	A	A	A
33	A	A	A
34	B	B	B
35	A	A	A
36	A	A	A
37	A	A	A
38	A	A	A
39	A	A	A
40	A	A	A
41	A	A	A
42	A	A	A

43	A	A	A
44	A	A	A
45	B	B	A
46	A	A	A
47	A	A	A
48	A	A	A
49	A	A	A
50	A	A	A
51	A	A	A
52	A	A	A
53	A	A	A
54	A	A	A
55	A	A	A
56	A	A	A
57	A	A	A
58	A	A	A
59	B	B	A
60	A	A	A
61	B	B	A
62	A	A	A
63	A	A	A
<i>kesesuaian</i>		62	59

Perhitungan uji reliabilitas (CR) pengkoding 1 $= \frac{2.M}{N_1+N_2}$

$$= \frac{2.62}{63+63} = 0,98$$

CR pengkoding 2 $= \frac{2.M}{N_1+N_2}$

$$= \frac{2.59}{63+63} = 0,93$$

Perhitungan analisis (peneliti) :

- A (seimbang) $= \frac{57}{63} \times 100\% = 90,5\%$
- B (tidak seimbang) $= \frac{6}{63} \times 100\% = 9,5\%$

Kompetensi

No	Peneliti	Intercoder I	Intercoder II
1	A	A	A
2	A	A	A
3	A	A	A
4	A	A	A
5	A	A	A
6	A	A	A
7	A	A	A

8	B	B	B
9	A	A	A
10	A	A	A
11	A	A	A
12	A	A	A
13	B	B	B
14	A	A	B
15	C	C	A
16	B	B	B
17	C	B	B
18	B	B	B
19	A	A	A
20	C	C	C
21	C	C	C
22	A	A	A
23	B	B	B
24	B	B	B
25	A	A	B
26	A	A	A
27	A	A	A
28	B	B	B
29	B	B	B
30	A	A	A
31	A	A	A
32	B	B	B
33	B	B	B
34	C	C	C
35	A	A	A
36	A	A	A
37	A	A	A
38	A	A	A
39	A	A	A
40	A	A	B
41	A	A	A
42	B	B	B
43	A	B	A
44	A	A	A
45	B	C	B
46	A	A	A
47	A	A	A
48	A	A	A
49	A	A	A
50	B	B	B
51	A	A	A
52	A	A	A
53	A	A	A
54	A	A	A
55	A	C	A

56	A	A	A
57	B	B	B
58	B	B	B
59	C	C	C
60	A	A	A
61	A	A	A
62	C	C	C
63	A	A	A
Kesesuaian		59	58

Perhitungan uji reliabilitas (CR) pengkoding 1 $= \frac{2.M}{N_1+N_2}$
 $= \frac{2.59}{63+63} = 0,93$

CR pengkoding 2 $= \frac{2.M}{N_1+N_2}$
 $= \frac{2.58}{63+63} = 0,92$

Perhitungan analisis (peneliti) :

- A (pelaku langsung) $= \frac{42}{63} \times 100\% = 66,6\%$
- B (Bukan pelaku langsung) $= \frac{14}{63} \times 100\% = 22,2\%$
- C (wartawan) $= \frac{7}{63} \times 100\% = 11,1\%$

Persamaan Jawaban

Kategori Akurasi

1. Kesesuaian isi dengan judul berita :

No	Heny	Martha	Niken
1	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
3	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10	Sesuai	Sesuai	Sesuai
11	Sesuai	Sesuai	Sesuai
12	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
13	Sesuai	Sesuai	Sesuai
14	Sesuai	Sesuai	Sesuai
15	Sesuai	Sesuai	Sesuai
16	Sesuai	Sesuai	Sesuai
17	Sesuai	Sesuai	Sesuai
18	Sesuai	Sesuai	Sesuai
19	Sesuai	Sesuai	Sesuai
20	Sesuai	Sesuai	Sesuai
21	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
22	Sesuai	Sesuai	Sesuai
23	Sesuai	Sesuai	Sesuai
24	Sesuai	Sesuai	Sesuai
25	Sesuai	Sesuai	Sesuai
26	Sesuai	Sesuai	Sesuai
27	Sesuai	Sesuai	Sesuai
28	Sesuai	Sesuai	Sesuai
29	Sesuai	Sesuai	Sesuai
30	Sesuai	Sesuai	Sesuai
31	Sesuai	Sesuai	Sesuai
32	Sesuai	Sesuai	Sesuai
33	Sesuai	Sesuai	Sesuai
34	Sesuai	Sesuai	Sesuai
35	Sesuai	Sesuai	Sesuai
36	Sesuai	Sesuai	Sesuai
37	Sesuai	Sesuai	Sesuai
38	Sesuai	Sesuai	Sesuai
39	Sesuai	Sesuai	Sesuai
40	Sesuai	Sesuai	Sesuai
41	Sesuai	Sesuai	Sesuai

42	Sesuai	Sesuai	Sesuai
43	Sesuai	Sesuai	Sesuai
44	Sesuai	Sesuai	Sesuai
45	Sesuai	Sesuai	Sesuai
46	Sesuai	Sesuai	Sesuai
47	Sesuai	Sesuai	Sesuai
48	Sesuai	Sesuai	Sesuai
49	Sesuai	Sesuai	Sesuai
50	Sesuai	Sesuai	Sesuai
51	Sesuai	Sesuai	Sesuai
52	Sesuai	Sesuai	Sesuai
53	Sesuai	Sesuai	Sesuai
54	Sesuai	Sesuai	Sesuai
55	Sesuai	Sesuai	Sesuai
56	Sesuai	Sesuai	Sesuai
57	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai
58	Sesuai	Sesuai	Sesuai
59	Sesuai	Sesuai	Sesuai
60	Sesuai	Sesuai	Sesuai
61	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai
62	Sesuai	Sesuai	Sesuai
63	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Kesesuaian		62	61

2. Pencantuman Waktu :

No	Heny	Martha	Niken
1	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
2	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
3	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
4	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
5	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
6	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
7	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
8	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
9	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
10	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
11	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
12	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
13	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
14	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
15	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
16	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
17	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
18	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
19	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan

20	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
21	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
22	Dicantumkan	Tidak Dicantumkan	Dicantumkan
23	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
24	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
25	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
26	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
27	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
28	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
29	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
30	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
31	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
32	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
33	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
34	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
35	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
36	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
37	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
38	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
39	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
40	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
41	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
42	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
43	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
44	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
45	Tidak Dicantumkan	Dicantumkan	Tidak Dicantumkan
46	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
47	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
48	Tidak Dicantumkan	Dicantumkan	Tidak Dicantumkan
49	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
50	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
51	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
52	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
53	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
54	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
55	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
56	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
57	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
58	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
59	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
60	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
61	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
62	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
63	Dicantumkan	Dicantumkan	Dicantumkan
Kesesuain		61	63

3. Penggunaan Data Pendukung :

No	Heny	Martha	Niken
1	Ada	Ada	Ada
2	Ada	Ada	Ada
3	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
4	Ada	Ada	Ada
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
6	Ada	Ada	Ada
7	Ada	Ada	Ada
8	Ada	Ada	Ada
9	Ada	Ada	Ada
10	Ada	Ada	Ada
11	Ada	Ada	Ada
12	Ada	Ada	Ada
13	Ada	Ada	Ada
14	Ada	Ada	Ada
15	Ada	Tidak Ada	Ada
16	Ada	Ada	Ada
17	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Ada	Ada	Ada
19	Ada	Ada	Ada
20	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
21	Ada	Ada	Ada
22	Ada	Ada	Ada
23	Ada	Ada	Ada
24	Ada	Ada	Ada
25	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Ada	Ada	Ada
27	Ada	Tidak Ada	Ada
28	Ada	Ada	Ada
29	Ada	Ada	Ada
30	Ada	Ada	Ada
31	Ada	Ada	Ada
32	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Ada	Ada	Ada
37	Ada	Tidak Ada	Ada
38	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
39	Ada	Tidak Ada	Ada
40	Ada	Ada	Ada
41	Ada	Ada	Ada
42	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
43	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
44	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

45	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
46	Ada	Ada	Ada
47	Ada	Ada	Ada
48	Ada	Ada	Ada
49	Ada	Tidak Ada	Ada
50	Ada	Ada	Tidak Ada
51	Ada	Ada	Ada
52	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
53	Ada	Ada	Tidak Ada
54	Ada	Tidak Ada	Ada
55	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
56	Ada	Tidak Ada	Ada
57	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
58	Ada	Tidak Ada	Ada
59	Ada	Tidak Ada	Ada
60	Ada	Ada	Ada
61	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
62	Ada	Ada	Ada
63	Ada	Ada	Ada
Kesesuain		52	60

4. Faktualitas Berita :

No	Heny	Martha	Niken
1	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
2	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
3	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
4	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
5	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
6	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
7	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
8	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
9	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran	Tdk ada pencampuran
10	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
11	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
12	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
13	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
14	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran	Ada pencampuran
15	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
16	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
17	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
18	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran	Ada pencampuran
19	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
20	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
21	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran	Ada pencampuran
22	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
23	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran	Ada pencampuran
24	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran

25	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
26	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
27	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
28	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran	Ada pencampuran
29	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
30	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
31	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran	Ada pencampuran
32	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
33	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
34	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
35	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
36	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
37	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
38	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran
39	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
40	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
41	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
42	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
43	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
44	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran
45	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran
46	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
47	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
48	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
49	Tidak ada pencampuran	Ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
50	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran
51	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
52	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
53	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Tdk ada pencampuran
54	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
55	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
56	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
57	Ada pencampuran	Ada pencampuran	Ada pencampuran
58	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
59	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
60	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
61	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
62	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
63	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran	Tidak ada pencampuran
Kesesuain		50	56

Kategori Ketidakberpihakan

1. Ditinjau dari Sumber Berita

No	Heny	Martha	Niken
1	Seimbang	Seimbang	Seimbang
2	Seimbang	Seimbang	Seimbang

3	Seimbang	Seimbang	Seimbang
4	Seimbang	Seimbang	Seimbang
5	Seimbang	Seimbang	Seimbang
6	B	B	Seimbang
7	Seimbang	Seimbang	Seimbang
8	Seimbang	Seimbang	Seimbang
9	Seimbang	Seimbang	Seimbang
10	Seimbang	Seimbang	Seimbang
11	Seimbang	Seimbang	Seimbang
12	Seimbang	Seimbang	Seimbang
13	Seimbang	Seimbang	Seimbang
14	Seimbang	Seimbang	Seimbang
15	Seimbang	Seimbang	Seimbang
16	Seimbang	Seimbang	Seimbang
17	Seimbang	Seimbang	Seimbang
18	Seimbang	Seimbang	Seimbang
19	Seimbang	Seimbang	Seimbang
20	Seimbang	Seimbang	Seimbang
21	Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang
22	Seimbang	Seimbang	Seimbang
23	Seimbang	Seimbang	Seimbang
24	Seimbang	Seimbang	Seimbang
25	Seimbang	Seimbang	Seimbang
26	Seimbang	Seimbang	Seimbang
27	Seimbang	Seimbang	Seimbang
28	Seimbang	Seimbang	Seimbang
29	Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
30	Seimbang	Seimbang	Seimbang
31	Seimbang	Seimbang	Seimbang
32	Seimbang	Seimbang	Seimbang
33	Seimbang	Seimbang	Seimbang
34	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang
35	Seimbang	Seimbang	Seimbang
36	Seimbang	Seimbang	Seimbang
37	Seimbang	Seimbang	Seimbang
38	Seimbang	Seimbang	Seimbang
39	Seimbang	Seimbang	Seimbang
40	Seimbang	Seimbang	Seimbang
41	Seimbang	Seimbang	Seimbang
42	Seimbang	Seimbang	Seimbang
43	Seimbang	Seimbang	Seimbang
44	Seimbang	Seimbang	Seimbang
45	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
46	Seimbang	Seimbang	Seimbang
47	Seimbang	Seimbang	Seimbang
48	Seimbang	Seimbang	Seimbang
49	Seimbang	Seimbang	Seimbang
50	Seimbang	Seimbang	Seimbang

51	Seimbang	Seimbang	Seimbang
52	Seimbang	Seimbang	Seimbang
53	Seimbang	Seimbang	Seimbang
54	Seimbang	Seimbang	Seimbang
55	Seimbang	Seimbang	Seimbang
56	Seimbang	Seimbang	Seimbang
57	Seimbang	Seimbang	Seimbang
58	Seimbang	Seimbang	Seimbang
59	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
60	Seimbang	Seimbang	Seimbang
61	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
62	Seimbang	Seimbang	Seimbang
63	Seimbang	Seimbang	Seimbang
<i>kesesuain</i>		62	59

2. Ditinjau dari Ukuran Fisik Kolom

No	Heny	Martha	Niken
1	Seimbang	Seimbang	Seimbang
2	Seimbang	Seimbang	Seimbang
3	Seimbang	Seimbang	Seimbang
4	Seimbang	Seimbang	Seimbang
5	Seimbang	Seimbang	Seimbang
6	Seimbang	Seimbang	Seimbang
7	Seimbang	Seimbang	Seimbang
8	Seimbang	Seimbang	Seimbang
9	Seimbang	Seimbang	Seimbang
10	Seimbang	Seimbang	Seimbang
11	Seimbang	Seimbang	Seimbang
12	Seimbang	Seimbang	Seimbang
13	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
14	Seimbang	Seimbang	Seimbang
15	Seimbang	Seimbang	Seimbang
16	Seimbang	Seimbang	Seimbang
17	Seimbang	Seimbang	Seimbang
18	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang
19	Seimbang	Seimbang	Seimbang
20	Seimbang	Seimbang	Seimbang
21	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang
22	Seimbang	Seimbang	Seimbang
23	Seimbang	Seimbang	Seimbang
24	Seimbang	Seimbang	Seimbang
25	Seimbang	Seimbang	Seimbang
26	Seimbang	Seimbang	Seimbang
27	Seimbang	Seimbang	Seimbang
28	Seimbang	Seimbang	Seimbang
29	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang

30	Seimbang	Seimbang	Seimbang
31	Seimbang	Seimbang	Seimbang
32	Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
33	Seimbang	Seimbang	Seimbang
34	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang
35	Seimbang	Seimbang	Seimbang
36	Seimbang	Seimbang	Seimbang
37	Seimbang	Seimbang	Seimbang
38	Seimbang	Seimbang	Seimbang
39	Seimbang	Seimbang	Seimbang
40	Seimbang	Seimbang	Seimbang
41	Seimbang	Seimbang	Seimbang
42	Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
43	Seimbang	Seimbang	Seimbang
44	Seimbang	Seimbang	Seimbang
45	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
46	Seimbang	Seimbang	Seimbang
47	Seimbang	Seimbang	Seimbang
48	Seimbang	Seimbang	Seimbang
49	Seimbang	Seimbang	Seimbang
50	Seimbang	Seimbang	Seimbang
51	Seimbang	Seimbang	Seimbang
52	Seimbang	Seimbang	Seimbang
53	Seimbang	Seimbang	Seimbang
54	Seimbang	Seimbang	Seimbang
55	Seimbang	Seimbang	Seimbang
56	Seimbang	Seimbang	Seimbang
57	Seimbang	Seimbang	Seimbang
58	Seimbang	Seimbang	Seimbang
59	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
60	Seimbang	Seimbang	Seimbang
61	Tidak Seimbang	Tidak Seimbang	Seimbang
62	Seimbang	Seimbang	Seimbang
63	Seimbang	Seimbang	Seimbang
kesesuaian		61	59

Kategori Validitas

1. Atribusi

No	Heny	Martha	Niken
1	Jelas	Jelas	Jelas
2	Jelas	Jelas	Jelas
3	Jelas	Jelas	Jelas
4	Jelas	Jelas	Jelas
5	Jelas	Jelas	Jelas
6	Jelas	Jelas	Jelas
7	Jelas	Jelas	Jelas

8	Jelas	Jelas	Jelas
9	Jelas	Jelas	Jelas
10	Jelas	Jelas	Jelas
11	Jelas	Jelas	Jelas
12	Jelas	Jelas	Jelas
13	Jelas	Jelas	Jelas
14	Jelas	Jelas	Jelas
15	Jelas	Jelas	Jelas
16	Jelas	Jelas	Jelas
17	Jelas	Jelas	Jelas
18	Jelas	Jelas	Jelas
19	Jelas	Jelas	Jelas
20	Jelas	Jelas	Jelas
21	Tidak Jelas	Jelas	Tidak Jelas
22	Jelas	Jelas	Jelas
23	Jelas	Jelas	Jelas
24	Jelas	Jelas	Jelas
25	Jelas	Jelas	Jelas
26	Jelas	Jelas	Jelas
27	Jelas	Jelas	Jelas
28	Jelas	Jelas	Jelas
29	Jelas	Jelas	Jelas
30	Jelas	Jelas	Jelas
31	Jelas	Jelas	Jelas
32	Jelas	Jelas	Jelas
33	Jelas	Jelas	Jelas
34	Jelas	Jelas	Jelas
35	Jelas	Jelas	Jelas
36	Jelas	Jelas	Jelas
37	Jelas	Jelas	Jelas
38	Jelas	Jelas	Jelas
39	Jelas	Jelas	Jelas
40	Jelas	Jelas	Jelas
41	Jelas	Jelas	Jelas
42	Jelas	Jelas	Jelas
43	Jelas	Jelas	Jelas
44	Jelas	Jelas	Jelas
45	Jelas	Jelas	Jelas
46	Jelas	Jelas	Jelas
47	Jelas	Jelas	Jelas
48	Jelas	Jelas	Jelas
49	Jelas	Jelas	Jelas
50	Jelas	Jelas	Jelas
51	Jelas	Jelas	Jelas
52	Jelas	Jelas	Jelas
53	Jelas	Jelas	Jelas
54	Jelas	Jelas	Jelas
55	Jelas	Jelas	Jelas

56	Jelas	Jelas	Jelas
57	Jelas	Jelas	Jelas
58	Jelas	Jelas	Jelas
59	Jelas	Jelas	Jelas
60	Jelas	Jelas	Jelas
61	Jelas	Jelas	Jelas
62	Jelas	Jelas	Jelas
63	Jelas	Jelas	Jelas
<i>kesesuain</i>		62	63

2. Kompetensi

No	Heny	Martha	Niken
1	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
2	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
3	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
4	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
5	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
6	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
7	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
8	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
9	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
10	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
11	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
12	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
13	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
14	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku tidak langsung
15	Wartawan	Wartawan	Pelaku langsung
16	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
17	Wartawan	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
18	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
19	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
20	Wartawan	Wartawan	Wartawan
21	Wartawan	Wartawan	Wartawan
22	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
23	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
24	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
25	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku tidak langsung
26	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
27	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
28	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
29	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
30	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
31	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
32	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
33	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
34	Wartawan	Wartawan	Wartawan
35	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung

36	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
37	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
38	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
39	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
40	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku tidak langsung
41	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
42	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
43	Pelaku langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku langsung
44	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
45	Pelaku tidak langsung	Wartawan	Pelaku tidak langsung
46	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
47	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
48	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
49	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
50	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
51	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
52	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
53	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
54	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
55	Pelaku langsung	Wartawan	Pelaku langsung
56	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
57	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
58	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung	Pelaku tidak langsung
59	Wartawan	Wartawan	Wartawan
60	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
61	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
62	Wartawan	Wartawan	Wartawan
63	Pelaku langsung	Pelaku langsung	Pelaku langsung
Kesesuaian		59	58